



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN
INFRASTRUKTUR
(PEMELIHARAAN JALAN PAVING YANG DIBANGUN MELALUI
P4IP DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN AMBULU
KABUPATEN JEMBER)**

*PUBLIC PARTICIPATION IN THE MAINTENANCE OF INFRASTRUCTURE
(MAINTENANCE ROAD PAVING THE BUILT BY SUB IN VILLAGE
KARANGANYAR P4IP AMBULU DISTRICT JEMBER)*

SKRIPSI

Oleh
Rino Erwan M
NIM 090910201110

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN
INFRASTRUKTUR
(PEMELIHARAAN JALAN PAVING YANG DIBANGUN MELALUI
P4IP DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN AMBULU
KABUPATEN JEMBER)**

*PUBLIC PARTICIPATION IN THE MAINTENANCE OF INFRASTRUCTURE
(MAINTENANCE ROAD PAVING THE BUILT BY SUB IN VILLAGE
KARANGANYAR P4IP AMBULU DISTRICT JEMBER)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh

**Rino Erwan M
NIM 090910201110**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Sumilah dan Ayahanda Murgito yang tercinta;
2. Adik-adik saya Mery Suchi Wulandari dan Trioda Rizqi Nurcahyo;
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat pula memajukannya.

(terjemahan Surat *Al A'Raaf* ayat 34)¹

Kehilangan waktu itu lebih sulit daripada kematian, karena kehilangan waktu membuatmu jauh dari Allah dan Hari Akhir, sementara kematian membuatmu jauh dari kehidupan dunia dan penghuninya saja

(Ibnu al-Qayyim)²

¹ <http://quran-terjemah.org/al-a-raf/34.html> diakses 18 Februari 2015

² <http://blog.al-habib.info/id/2013/05/kata-mutiara-islam-tentang-kehidupan-dunia.html>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rino Erwan Murdiantoro

NIM : 090910201110

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN JALAN (Pemeliharaan Jalan Paving yang Dibangun Melalui P4IP di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 April 2015
Yang menyatakan,

Rino Erwan Murdiantoro
NIM 090910201110

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN
INFRASTRUKTUR
(Pemeliharaan Jalan Paving yang Dibangun Melalui P4IP
di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)**

Oleh
Rino Erwan Murdiantoro
NIM 090910201110

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Agus Suharsono, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Boedijono, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Infrastruktur (Studi Pemeliharaan Jalan Paving yang Dibangun Melalui P4IP di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : 19 Maret 2015

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji
Ketua,

Hadi Makmur, S.Sos, M.AP
NIP. 197410072000121001

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Agus Suharsono, M.Si
NIP. 196308141989031023

Drs. Anwar, M.Si
NIP. 196306061988021001

Mengesahkan
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi M.A.
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Jalan (Studi Pemeliharaan Jalan Paving yang dibangun melalui P4IP di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember; Rino Erwan Murdiantoro, 090910201110; 2015; 76 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Infrastruktur merupakan sarana penunjang yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, di beberapa tempat masih ditemukan suatu wilayah yang belum memiliki infrastruktur yang memadai. Pemerintah melalui Kementerian PU Cipta Karya mengeluarkan program yang membantu masyarakat dalam memenuhi mencukupi infrastruktur yang mereka butuhkan yaitu, program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman (P4IP). Program ini merupakan bantuan langsung dan program pembangunan infrastruktur yang menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat, jadi dalam setiap kegiatan program tersebut wajib mengikutsertakan masyarakat. Hal ini bertujuan agar pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah pelaksanaan program di Desa Karanganyar. Desa Karanganyar merupakan satu-satunya desa yang ada di Kabupaten Jember yang mendapatkan bantuan program. Bantuan program tersebut, digunakan oleh masyarakat Desa Karanganyar untuk pembangunan jalan paving. Namun, di salah satu titik pengerjaan pembangunan jalan paving, ditemukan jalan paving yang mengalami kerusakan. Kerusakan pada jalan paving ini dibiarkan begitu saja oleh masyarakat, sehingga hal ini terkesan masyarakat tidak memiliki kesadaran akan pemeliharaan jalan paving tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur yaitu, jalan paving. Peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa warga desa yang berada di sekitar jalan paving yang rusak. Menurut ketua RT setempat,

mengungkapkan bahwa pemeliharaan jalan paving sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat. Desa Karanganyar merupakan salah satu desa yang mendapatkan program pembangunan infrastruktur tersebut. Bantuan dana yang didapatkan, digunakan sepenuhnya untuk pembangunan jalan paving yang tersebar di beberapa titik di Desa Karanganyar. Pembangunan jalan paving dipilih berdasarkan musyawarah dengan beberapa warga dan aparat desa yaitu, Ketua LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) Desa Karanganyar. Berdasarkan wawancara dengan ketua LKM Desa Karanganyar, yaitu Bapak Baitul Aziz, bahwa pembangunan jalan paving ini telah selesai dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2013.

Pada saat peneliti melakukan observasi lapangan, ditemukan adanya kerusakan pada jalan paving di salah satu titik pembangunan jalan paving di Desa Karanganyar, tepatnya di RT 1 RW 13 Dusun Krajan. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak adanya tindakan pemeliharaan dari masyarakat terhadap jalan paving, sehingga terlihat kerusakan yang terjadi dibiarkan begitu saja oleh masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa yang menjadi penyebab tidak adanya pemeliharaan terhadap jalan paving tersebut adalah masyarakat belum mengerti siapa yang bertanggung jawab untuk memelihara jalan paving tersebut, hal itu didasari oleh wawancara peneliti dengan beberapa warga. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, salah satu penyebab pembiaran kerusakan pada jalan paving adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pemeliharaan jalan paving, selain itu pula kurangnya keaktifan dari ketua RT setempat untuk menggerakkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, informasi tentang pemeliharaan jalan paving ini harus diberikan secara merata, agar setiap masyarakat mengerti bahwa mereka lah yang bertanggung jawab untuk memelihara jalan paving yang dibangun melalui program pembangunan infrastruktur (P4IP). Selain itu sosialisasi mengenai sistem perlu dilakukan, jadi dari awal telah ditentukan siapa yang bertugas untuk mengkoordinir warga, lalu dana didapat darimana, dan siapa yang bertugas untuk memperbaiki.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN JALAN (Studi Pemeliharaan Jalan Paving yang dibangun melalui Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)” skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat untuk dinyatakan lulus dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari begitu banyak suka dan duka dalam pelaksanaan penyusunan Skripsi ini tetapi karena berkat anugerah Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam banyak hal selama proses penyusunan hingga dapat terselesaikannya Skripsi ini, antara lain kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswandi, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A.,Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi, S.sos, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Dr. Anastasia, M.si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
5. Drs. Anwar, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Drs. Agus Suharsono M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama;
7. Drs. Boedijono M.Si selaku Dosen Pembimbing Pembantu;
8. Dina Suryawati, S.sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing Pembantu sebelumnya;

9. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
10. Sunaryo selaku Kepala Desa Karanganyar;
11. Baitul Aziz S.Sos selaku Ketua Lembaga Keswadayaan Masyarakat Desa Karanganyar;
12. Sujarno selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Bilung;
13. Siswanto selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Togog;
14. Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Jember;
15. Roby selaku tim fasilitator PNPM Mandiri;
16. Rekan satu angkatan selama menempuh perkuliahan di Prodi Administrasi Negara Universitas Jember;
17. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini masih terdapat kekurangan baik pada sistem penyusunan maupun pembahasannya. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan para pembaca berkenan memberikan saran dan kritik yang membangun sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para penulis sendiri maupun bagi para pembaca.

Jember, 9 April 2015

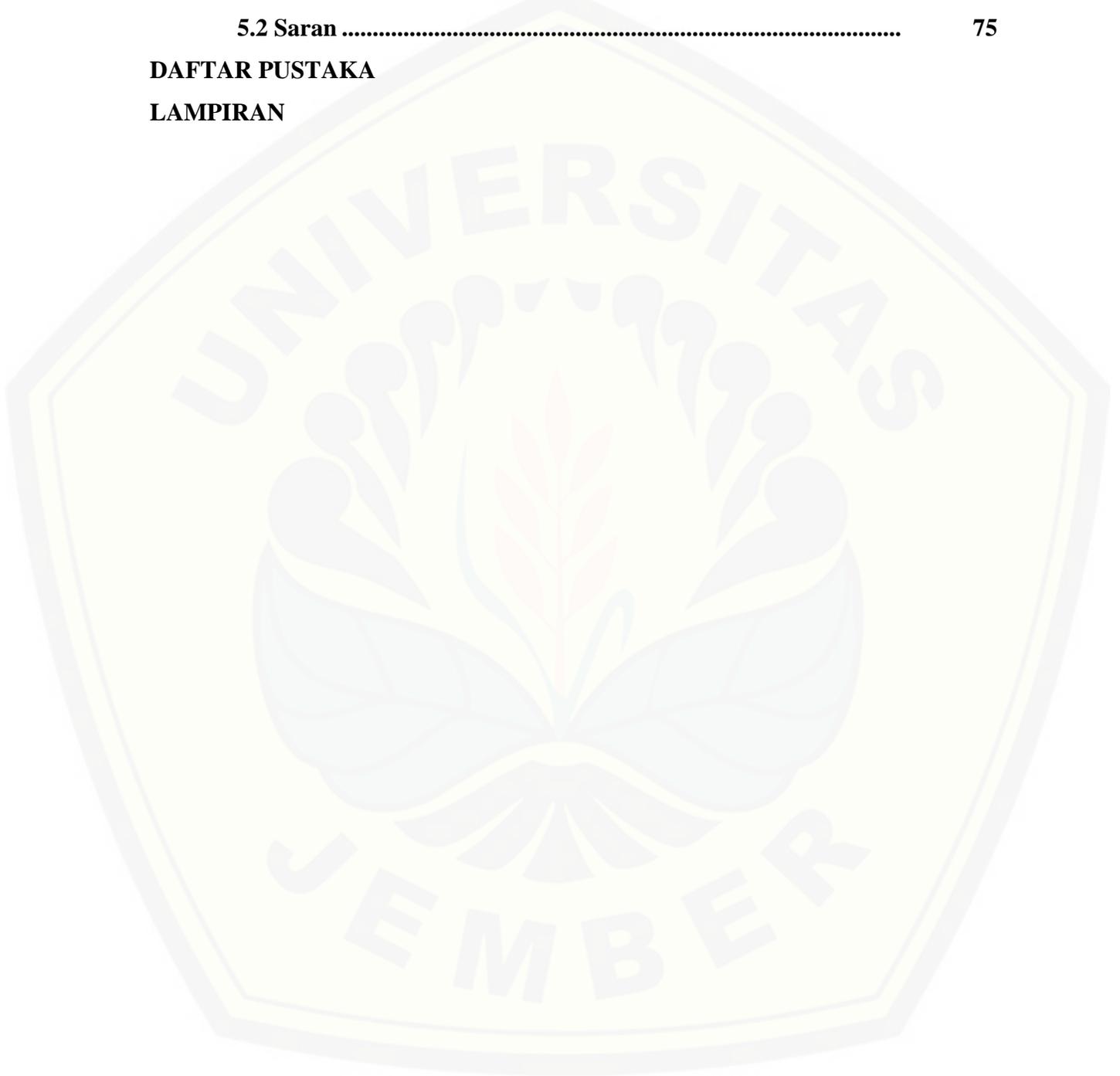
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pembangunan.....	10
2.2 Partisipasi Masyarakat.....	13
2.2.1 Pengertian Partisipasi.....	13
2.2.2 Pengertian Masyarakat.....	14
2.2.3 Partisipasi Masyarakat	15
2.2.4 Lingkup Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	15

2.2.5 Bentuk-bentuk Partisipasi	17
2.2.6 Derajat Partisipasi Masyarakat	19
2.3 Pemeliharaan.....	22
2.4 Infrastruktur	26
2.5 Kerangka Konseptual.....	27
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Fokus Penelitian	30
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
3.4 Data dan Sumber Data	31
3.5 Penentuan Informan Penelitian.....	31
3.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	32
3.7 Teknik Analisis Data.....	34
3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data	36
BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	40
4.2 Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP).....	50
4.2.1 Penentuan Lokasi Sasaran	53
4.2.2 Jenis Kegiatan Infrastruktur.....	54
4.2.3 Jenis Kegiatan yang Tidak Boleh dilakukan (Negatif List)	54
4.3 Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Desa Karanganyar	55
4.4 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	59
4.5 Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Jalan Paving.....	65

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Teknik Pemeriksaan Data Kualitatif Moleong.....	39
4.1 Rata-rata Konsumsi Kalori (KKal) per Kapita Sehari Menurut Kelompok Makanan 2011-2013.....	44
4.2 Jumlah Penduduk Desa Karanganyar Per Dusun.....	45
4.3 Jumlah Kepala Keluarga (KK) Per Dusun.....	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Tangga Partisipasi Arnstein	20
2.2 Kerangka Berpikir Penelitian.....	27
3.1 Komponen Analisis Data	34
4.1 Struktur Organisasi Lembaga Keswadayaan Masyarakat Desa Karanganyar	57
4.2 Struktur Organisasi Kelompok Swadaya Masyarakat Bilung Desa Karanganyar	63

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- B. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
- C. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
- D. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 314 Tentang Penetapan Desa / Kelurahan Sasaran Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP).
- E. Daftar Kelurahan/ Desa Sasaran Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) di Jawa Timur.
- F. Pedoman Wawancara.
- G. Dokumentasi.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jalan paving yang didanai melalui Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) di Desa Karang Anyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Program ini merupakan salah satu produk dari kebijakan pemerintah di bidang infrastruktur. Program ini dibuat agar masyarakat dapat menikmati fasilitas publik yang dinilai belum memadai, sehingga dapat memperlancar kegiatan masyarakat setiap hari. Oleh karena itu, dengan adanya program ini diharapkan dapat menunjang pembangunan infrastruktur di Indonesia, sehingga masyarakat dapat hidup dengan sejahtera.

Pembangunan di Indonesia sampai saat ini terbilang masih belum merata, khususnya pada pembangunan infrastruktur. Hal itu dibuktikan dengan masih adanya wilayah di Indonesia yang masuk kategori daerah tertinggal (sumber: nasional.kompas.com diakses 3 Maret 2014). Salah satu ciri suatu daerah disebut sebagai daerah tertinggal adalah minimnya prasarana (infrastruktur) yang ada di daerah tersebut. Macam-macam infrastruktur seperti; jalan, gedung sekolah, fasilitas kesehatan (rumah sakit atau puskesmas), dan infrastruktur publik lainnya dianggap masih terbatas dan belum merata di semua wilayah Indonesia.

Salah satu infrastruktur publik yang dinilai penting bagi masyarakat adalah akses jalan. Jalan dianggap sebagai suatu sarana yang dapat menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. Keberadaan jalan ini, dapat membantu masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat lain yang berada di tempat berbeda, dan bagi mereka yang melakukan kegiatan perekonomian (kegiatan jual beli) dapat memasarkan

barang produksinya kepada konsumen yang berada ditempat yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga hal ini dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, jalan ini bisa dikatakan sebagai prasarana yang vital bagi masyarakat, akan tetapi permasalahannya adalah tidak semua wilayah di Indonesia memiliki akses jalan yang memadai. Ketidakmerataan pembangunan tersebut, dapat disebabkan karena adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, seperti; dana dan sumber daya lainnya, sehingga pemerintah masih belum bisa memenuhi kebutuhan infrastruktur diseluruh wilayah Indonesia dalam waktu yang singkat. Selain itu, masyarakat masih menganggap bahwa pembangunan itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga masyarakat cenderung hanya menunggu bantuan dari pemerintah tersebut. Seharusnya masyarakat bisa turut aktif dalam kegiatan pembangunan, karena tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab dalam pembangunan, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah membuat suatu program untuk menumbuhkan kesadaran dari masyarakat agar bisa membantu tugas pemerintah dalam kegiatan pembangunan infrastruktur.

Salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Program Percepatan dan Perluasan Infrastruktur Permukiman (P4IP). Program ini merupakan program pemerintah dibidang pembangunan infrastruktur yang menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat yang berada dibawah naungan Kementerian PU Cipta Karya. Dalam program tersebut, masyarakat tidak hanya dianggap sebagai obyek pembangunan, melainkan mereka juga diajak untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan program ini. Oleh karena itu, kegiatan yang meliputi; perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi ini, sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat. Suatu hal yang diharapkan oleh pemerintah dengan adanya program seperti ini adalah, masyarakat tidak lagi hanya bergantung kepada pemerintah, sehingga hal ini dapat menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Apabila terdapat suatu permasalahan yang penting dimasyarakat, artinya permasalahan tersebut perlu ditangani dengan segera, maka masyarakat dapat membuat suatu

keputusan sendiri untuk menangani permasalahan tersebut tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah.

Sebelumnya telah disampaikan bahwa P4IP merupakan program pembangunan dibidang infrastruktur yang menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat. Adapun lingkup dari partisipasi masyarakat ini meliputi: partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi, serta partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan. (sumber: Mardikanto dan Soebianto,2012)

Pertama, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan suatu pilihan dari beberapa alternatif yang ada. Kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan melalui program P4IP adalah, masyarakat dapat menentukan sendiri hal apa yang mereka inginkan dan mereka butuhkan, lalu mereka pula yang menentukan sumber daya yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut. Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut, dinilai lebih mengetahui infrastruktur apa yang mereka butuhkan, karena nantinya yang akan menggunakan infrastruktur tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya partisipasi masyarakat tersebut, diharapkan keputusan yang diambil akan tepat sesuai dengan permasalahan yang mereka alami. Masyarakat juga menentukan sumber daya yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur ini, seperti: besarnya anggaran yang nantinya akan digunakan, kualitas barang yang akan digunakan dalam menunjang pembangunan infrastruktur ini. Dalam hal ini, masyarakat dilatih untuk bisa *manage* sumber daya secara efektif dan efisien.

Kedua, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini, terdapat berbagai macam bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Masyarakat dapat melibatkan diri dengan berpartisipasi dalam bentuk tenaga maupun dalam bentuk yang lain, seperti memberikan bantuan berupa material barang yang digunakan dalam pembangunan

infrastruktur, seperti: pasir dan semen. Kegiatan pelaksanaan pembangunan secara gotong royong ini dapat memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Dampak positifnya adalah kegiatan pembangunan infrastruktur dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang diinginkan atau bahkan dapat lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan. Pengerjaan pembangunan infrastruktur secara gotong royong ini, selain dapat mempercepat pengerjaan, juga dapat mempererat silaturahmi antar warga, sehingga hubungan kekerabatan antar masyarakat terjaga dengan baik.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini merupakan suatu kegiatan pengawasan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan. Beberapa hal yang dapat diawasi oleh masyarakat adalah kinerja dari sumber daya manusianya dan penggunaan dana yang dipakai untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan, terutama penyimpangan dana yang digunakan dalam kegiatan pembangunan tersebut. Masyarakat dapat terlibat langsung dalam kegiatan perencanaan maupun kegiatan pelaksanaan, untuk memeriksa kesesuaian antara apa yang sudah direncanakan dengan apa yang sudah direalisasikan.

Keempat, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Hal ini untuk menilai apakah infrastruktur yang telah dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak. Penilaian ini mungkin diperuntukkan terhadap pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat sejak awal kegiatan. Namun, bagi program pembangunan infrastruktur yang menggunakan keterlibatan masyarakat sejak awal kegiatan, maka kemungkinan untuk tidak dimanfaatkan itu lebih kecil dibandingkan program pembangunan infrastruktur yang tidak melibatkan masyarakat sejak awal kegiatan, yaitu perencanaan kegiatan.

Program pembangunan yang menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat adalah program pembangunan yang setiap kegiatannya, melibatkan masyarakat. Hal itu telah disampaikan diatas, bahwa partisipasi masyarakat mencakup: kegiatan

perencanaan atau pengambilan keputusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan. Masyarakat menganggap bahwa ketika proyek pembangunan itu telah selesai dibangun, maka selesai pula keikutsertaan mereka dalam kegiatan program tersebut. Anggapan itu merupakan anggapan yang salah, karena yang lebih penting lagi dari keempat lingkup partisipasi masyarakat yang telah disampaikan diatas, adalah partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek pembangunan yang telah mereka kerjakan. Masyarakat dinilai sering melupakan partisipasinya dalam pemeliharaan proyek pembangunan yang telah diselesaikan. Hal ini tentu akan memberikan kerugian bagi masyarakat itu sendiri apabila infrastruktur yang telah mereka selesaikan dibiarkan begitu saja tanpa adanya perawatan atau pemeliharaan.

Kegiatan pemeliharaan pada infrastruktur dinilai penting karena infrastruktur ini akan dinikmati oleh masyarakat, sehingga apabila infrastruktur ini mengalami kerusakan, maka tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan suatu barang yang dibuat oleh manusia, apabila digunakan terus menerus akan mengalami kerusakan atau penurunan kualitas pada barang tersebut. Oleh karena itu, infrastruktur yang telah dibangun oleh masyarakat, apabila digunakan terus menerus juga akan mengalami kerusakan atau penurunan kualitas. Salah satu contoh kasusnya adalah pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan di Desa Amanah Anyar, Kabupaten Padeklang (sumber: Harianjayapos.com edisi Minggu, 05 Agustus 2012 yang diakses 20 Oktober 2014). Berdasarkan berita tersebut, infrastruktur yang telah dibangun melalui PNPM-MP mengalami kerusakan, yaitu berupa sarana MCK bagi masyarakat, namun permasalahannya adalah kerusakan yang terjadi pada infrastruktur itu, dibiarkan begitu saja oleh masyarakat, sehingga sarana MCK tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. Dalam berita yang dimuat oleh media *online* tersebut, dikatakan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam merawat infrastruktur yang sudah dibangun menjadi salah satu penyebab kerusakan infrastruktur itu dibiarkan. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa masyarakat melupakan tanggung jawabnya untuk merawat infrastruktur yang telah dibangun. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa partisipasi masyarakat

yang tak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat dalam memelihara infrastruktur yang telah dibangun, terutama infrastruktur yang dibangun melalui program pembangunan dengan pendekatan partisipasi masyarakat. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kerusakan tersebut adalah, infrastruktur yang sudah dibangun, tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pemeliharaan ini penting untuk dilakukan, supaya infrastruktur yang sudah dibangun dapat terjaga kualitasnya, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam jangka waktu yang panjang.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian terhadap partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jalan paving yang telah dibangun melalui P4IP di Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Desa Karanganyar merupakan satu-satunya desa di Kabupaten Jember yang memperoleh bantuan P4IP (sumber: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 314/KPTS/M/2013). Berdasarkan wawancara pada observasi awal peneliti dengan Bapak Baitul Aziz (Ketua LKM Desa Karanganyar), bahwa bantuan langsung yang diterima oleh desa tersebut sepenuhnya digunakan untuk pembangunan jalan paving. Jalan paving yang dibangun oleh masyarakat Desa Karanganyar, tersebar di beberapa titik pengerjaan, yaitu Dusun Krajan (3 titik pengerjaan: RT 01 RW 11, RT 02 RW 15, RT 03 RW 06) dengan panjang keseluruhan mencapai 609,1 m dan lebar jalan yang bervariasi mulai 1 m sampai 2 m, Dusun Sentong (2 titik pengerjaan: RT 03 RW 20, RT 05 RW 20) dengan panjang keseluruhan mencapai 280,1 m dan lebar 2 m, dan Dusun Sumberan (5 titik pengerjaan: RT 02 RW 05, RT 02 RW 06, RT 04 RW 04, RT 04 RW 05, RT 04 RW 06) dengan panjang keseluruhan mencapai 869,3 m dan lebar jalan yang bervariasi mulai 1 m sampai 2 m. Selain itu, jalan paving yang dibangun merupakan jalan yang relatif datar, yang dapat digunakan oleh pejalan kaki maupun pengguna sepeda, sepeda motor dan becak. Jalan paving yang dibangun merupakan jalan yang menghubungkan antara satu tempat ke tempat yang lain, jadi antara satu wilayah RT berhubungan dengan wilayah RT yang lain.

Penelitian ini penting untuk dilakukan, karena berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti saat observasi awal, peneliti menemukan jalan paving di salah satu titik pengerjaan mengalami kerusakan, yaitu jalan paving yang berada di RT 1 RW 13 Dusun Krajan. Berdasarkan proposal kegiatan pembangunan jalan paving, lingkungan RT ini tidak tertulis, hal itu dikarenakan jalan paving yang dibangun di lingkungan RT tersebut mencakup beberapa meter saja, karena menurut masyarakat merasa tanggung, maka jalan di lingkungan RT tersebut ikut dipasang paving. Namun kondisi dari jalan paving di lingkungan RT tersebut mengalami kerusakan, kerusakan itu berupa jalan paving yang retak sepanjang 5 m, dan beberapa bagian jalan paving yang ambles sepanjang 7 m dari total jalan paving yang mencapai 30 m. Menurut bapak Sabilan sebagai ketua RT 1 RW 13 menyatakan, bahwa ketika pengerjaan pemasangan paving, permukaan tanah yang labil itu telah diratakan sebelumnya, namun karena terus menerus diguyur hujan, maka permukaan tanah tersebut menjadi ambles. Menurut warga yang berada di sekitar jalan tersebut, bahwa kerusakan pada jalan paving ini telah ada pada musim penghujan awal tahun 2014 lalu, namun sampai saat ini kerusakan tersebut masih dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya perbaikan dari masyarakat. Program pembangunan yang menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat seperti P4IP, seharusnya partisipasi dari masyarakat tidak sebatas sampai kegiatan pelaksanaannya saja, namun partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan juga penting untuk dilakukan, supaya jalan paving yang sudah dibangun dapat dilewati dengan nyaman. Kerusakan yang terjadi pada jalan paving tersebut, seharusnya menjadi tanggung jawab dari masyarakat. Hal ini diperkuat oleh keterangan yang disampaikan oleh Bapak Baitul Aziz selaku Ketua LKM Desa Karanganyar, bahwa untuk pemeliharaan jalan paving yang dibangun melalui P4IP, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat. Hal ini pula telah disosialisasikan kepada seluruh Ketua RT/ RW yang mendapatkan bantuan mengenai pemeliharaan jalan paving tersebut. Peneliti pun melakukan verifikasi tentang tanggung jawab pemeliharaan yang disampaikan oleh Ketua LKM kepada Ketua RT 1 RW 13. Menurut Bapak Sabilan (Ketua RT 1 RW 13) menyatakan, bahwa untuk

pemeliharaan jalan paving itu diserahkan kepada warga yang bertempat tinggal di sekitar jalan paving tersebut. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kedua informan tersebut, jelas bahwa yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan jalan paving adalah masyarakat itu sendiri.

Permasalahan yang terjadi pada jalan paving di Desa Karanganyar ini, merupakan suatu bukti bahwa kesadaran masyarakat untuk merawat infrastruktur yang telah dibangun masih kurang. Hal ini menguatkan teori yang disampaikan oleh Mardikanto dan Soebianto (2012:83) bahwa, partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek-proyek kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan sering dilupakan. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui penyebab kurangnya kesadaran masyarakat untuk merawat infrastruktur yang telah mereka bangun.

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Infrastruktur (Pemeliharaan Jalan Paving yang Dibangun Melalui P4IP di Desa Karang Anyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember).”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur yang dibangun melalui P4IP di Desa Karanganyar?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur yang dibangun melalui P4IP di Desa Karanganyar.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu kebijakan publik.

b. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjamin proyek yang telah dibangun, yang juga bisa dinikmati oleh masyarakat yang bersangkutan.

c. Manfaat bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan gagasan bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada penelitian kualitatif, teori diperlukan untuk memberikan dasar atas penelitian yang dilakukan, juga sebagai pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Teori dalam penelitian kualitatif diperlukan dengan mengacu pada beberapa alasan. *Pertama*, dengan memahami teori, seorang peneliti dapat menyajikan kerangka konseptual penelitian berikut memberikan alasan kuat, dari sisi teori, tentang pentingnya penelitian itu dilakukan. *Kedua*, dapat membantu pengembangan wawasan intelektual dalam membangun pertanyaan-pertanyaan penelitian secara mendasar dan tajam. *Ketiga*, dapat memberikan suatu keyakinan dan kemantapan bahwa di atas abstrak penelitian yang dilakukan menemukan relevansi logika dengan teori tertentu (Bungin, 2012: 45-46).

2.1 Pembangunan

Menurut Siagian (2003:4) Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander dalam Siagian, 2003:4). Mardikanto (2012:2) menyatakan bahwa pembangunan merupakan segala upaya yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi secara terus menerus. Berdasarkan definisi diatas, pembangunan merupakan upaya yang

dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dalam rangka menuju perubahan kondisi yang lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Siagian (2003:4) menyampaikan suatu pembangunan penting untuk dilakukan, sebagai berikut,

- a. Pembangunan merupakan suatu proses. Hal itu berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan secara berkelanjutan terdiri dari tahap-tahap yang satu pihak bersifat independen, akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*). Banyak cara yang digunakan untuk menentukan tahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.
- b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan kata lain, jika dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara *sporadic* atau *incidental*, kegiatan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai pembangunan.
- c. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, sedang dan jangka pendek. Seperti dimaklumi merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan;
- d. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan profokatif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan kata lain,

suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan *status quo*.

- e. Pembangunan mengarah pada modernitas. Hal ini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. Walaupun demikian, perlu diingatkan bahwa konsep modernitas tidak identik dengan “cara hidup gaya barat”. Setiap negara bangsa yang modern harus tetap mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai yang dipandang luhur oleh negara bangsa yang bersangkutan. Bahwa ada aspek-aspek nilai tersebut yang memerlukan penyesuaian karena tuntutan zaman, itupun harus diakui dan dijadikan masukan dalam merumuskan strategi pembangunan yang akan ditempuh.
- f. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per definisi bersifat multi dimensional. Artinya, modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat mengejawantah dalam bidang politik, ekonomi sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.
- g. Semua hal yang telah disinggung diatas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaanya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara bangsa lain tersebut.

Adapun dalam manajemen pembangunan dijelaskan, manajemen pembangunan adalah manajemen publik (negara) dengan ciri tertentu, seperti juga administrasi pembangunan adalah administrasi publik dengan ciri tertentu, seperti juga administrasi pembangunan adalah administrasi publik yang memiliki ciri tertentu pula. Untuk analisa manajemen pembangunan dikenali beberapa fungsi yang

cukup nyata, yakni: (1) perencanaan, (2) pengerahan sumber daya, (3) pengerahan partisipasi masyarakat, (4) penganggaran, (5) pelaksanaan pembangunan yang langsung ditangani oleh pemerintah, (6) koordinasi, (7) pemantauan dan evaluasi, (8) pengawasa (Kartasmita, 1997:48)

Berdasarkan keterangan diatas, keberhasilan suatu pembangunan, segala kegiatan diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat. Hal itu disebabkan masyarakat sendiri yang menjadi objek pembangunan, lebih mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dapat diketahui secara langsung, sehingga dengan begitu masyarakat juga lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh mereka dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu pula, dengan terlibatnya masyarakat dalam perencanaan program pembangunan, mereka pula dapat menjadi pengawas dan pelaksana terhadap program pembangunan yang telah mereka rencanakan. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tersebut, diharapkan dapat mensukseskan program pembangunan yang dilaksanakan, sehingga keberhasilan program pembangunan dapat tercapai.

2.2 Partisipasi Masyarakat

2.2.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan, baik secara sukarela maupun atas dorongan tertentu. Menurut Bornby (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012:81), mendefinisikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

Beal (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012:81) mengemukakan bahwa partisipasi, terlebih lagi partisipasi yang tumbuh karena suatu pengaruh atau tumbuh dengan rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat menunjukkan sebagai proses perubahan sosial eksogen. Lebih lanjut dijelaskan oleh Mardikanto dan

Soebiato, bahwa karakteristik dari proses partisipasi adalah, semakin mantapnya jaringan sosial (*social network*) yang “baru” yang membentuk jaringan sosial yang dapat mewujudkan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, partisipasi sebagai proses akan membentuk jaringan sosial baru yang melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat.

2.2.2 Pengertian Masyarakat

Menurut Koentjaraningrat (1990:146) masyarakat merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas manusia yang melakukan interaksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang berjalan secara berkelanjutan dan terikat pada identitas kebersamaan. Berdasarkan definisi yang disampaikan oleh Koentjaraningrat, maka masyarakat diartikan sebagai individu-individu yang saling berinteraksi bersama, dan dijalani secara berkelanjutan dengan didasari pada aturan yang telah ditetapkan bersama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Berdasarkan definisi tersebut, didalam kehidupan masyarakat terdapat suatu ikatan yang sudah disepakati bersama, seperti adanya norma yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.

Menurut Soekanto (yang dikutip oleh Basrowi) bahwa ciri-ciri masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama;
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
- c. Mereka sadar;
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

2.2.3 Partisipasi Masyarakat

Menurut Adi (dalam Mardikanto dan Soebianto, 2012:81) yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat adalah adanya keikutsertaan atau keterlibatan dari masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah, pengidentifikasian potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan alternatif solusi penanganan masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan juga keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Berdasarkan definisi yang telah disampaikan diatas, jadi masyarakat diajak untuk terlibat dalam kegiatan proses pengambilan keputusan, supaya mereka dapat bertindak dengan mandiri tanpa harus bergantung kepada pemerintah atau pembuat kebijakan. Masyarakat yang mandiri, diharapkan apabila terdapat masalah di kehidupan masyarakat, masyarakat dapat dengan sendirinya mengatasi masalah tersebut, sehingga masalah itu pun bisa terselesaikan secara efisien.

2.2.4 Lingkup Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Telah disampaikan diatas bahwa pengertian partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan, baik secara sukarela maupun atas dorongan tertentu. Yadav (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012:82) mengemukakan empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat didalam kegiatan pembangunan, yaitu:

- a. partisipasi dalam pengambilan keputusan;
- b. partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan;
- d. partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

Empat macam kegiatan partisipasi masyarakat yang telah disampaikan sebelumnya, akan peneliti jelaskan sebagai berikut.

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, dan sebagian besar merupakan pencerminan dari kebutuhan para elit yang berkuasa, sehingga hal ini kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program pembangunan di wilayah setempat. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan, maka pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, karena hal itu disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Jadi tidak hanya tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan juga peran serta dari aparat pembangunan.

d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Selain keempat lingkup partisipasi masyarakat yang telah disampaikan diatas, Mardikanto dan Soebiato (2012:83) menambahkan bahwa, yang sering dilupakan dalam kegiatan partisipasi masyarakat pelaksanaan pembangunan adalah partisipasi masyarakat dalam memelihara proyek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam bidang pemeliharaan produk pembangunan dinilai penting karena dapat memperpanjang usia dari produk pembangunan tersebut. Produk pembangunan yang telah ada dapat terus dinikmati atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama.

2.2.5 Bentuk-bentuk Partisipasi

Menurut Dusseldorp (dalam Mardikanto dan Subiato, 2012:84) bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa:

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat;
- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain;
- d. Menggerakkan sumberdaya masyarakat;
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan;
- f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Menurut Keith Davis (dalam Sastropetro, 1988:16) (sumber: pasca.unand.ac.id, diakses 5 April 2014) dikemukakan bahwa Bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat adalah berupa;

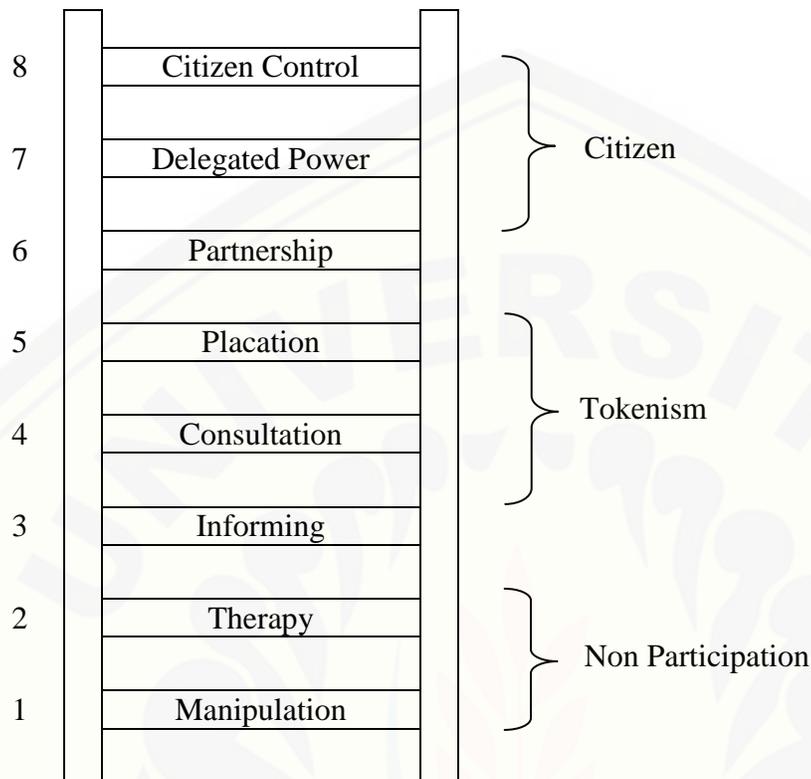
- a. Pikiran;
- b. Tenaga;
- c. Keahlian;
- d. Barang;
- e. uang.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat diatas akan dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, adalah partisipasi dalam bentuk pikiran, merupakan bentuk partisipasi yang memberikan ide atau gagasan dalam setiap kegiatan pembangunan. Hal ini biasanya dilakukan pada saat musyawarah warga atau kegiatan rapat program pembangunan. Tujuan dari adanya partisipasi tersebut diharapkan agar dapat menyempurnakan perencanaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga hasil kegiatan pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Kedua*, adalah partisipasi dalam bentuk tenaga, biasanya bentuk partisipasi ini diberikan pada saat kegiatan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat dapat bekerja secara gotong royong, hal ini selain dapat mempercepat pengerjaan, juga dapat mempererat hubungan antar masyarakat. *Ketiga*, adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keahlian. Keahlian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.web.id diakses 5 April 2014) merupakan kemahiran dalam suatu ilmu. Kemahiran ini dapat berupa; mahir dalam perencanaan, maupun mahir dalam ilmu pertukangan. Setiap program pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur, tentunya membutuhkan orang-orang yang ahli dalam bidang pembangunan tersebut. Hal itu dikarenakan, tidak semua masyarakat memiliki keahlian dalam ilmu pertukangan, agar pembangunan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan orang-orang yang ahli sehingga proses pengerjaannya dapat berhasil. *Keempat*, partisipasi masyarakat dalam bentuk barang. Barang merupakan suatu hal yang diperlukan dalam kegiatan atau sesuatu hal yang dapat menunjang kegiatan tersebut. Hal ini dapat dicontohkan

seperti, partisipasi masyarakat dengan memberikan bahan material (batu, pasir, semen) yang dapat menunjang kegiatan pembangunan infrastruktur. *Kelima*, partisipasi masyarakat dalam bentuk uang. Secara umum, uang diterima sebagai alat pembayaran atas pembelian suatu barang atau jasa. Dalam pelaksanaan program pembangunan, uang dapat digunakan untuk membayar jasa para pekerja ahli yang terlibat dalam kegiatan pembangunan, selain itu banyak hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan uang. Masyarakat dapat menggunakan uang untuk pembelian bahan material pembangunan (batu, pasir, semen), menyediakan konsumsi bagi para pekerja, dan dapat membantu melancarkan kegiatan pembangunan. Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dijelaskan, masyarakat dapat memilih bentuk partisipasi yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka.

2.2.6 Derajat Partisipasi Masyarakat

Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan yang menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat dapat diukur kadar partisipasinya melalui tangga partisipasi. Tangga partisipasi ini memiliki delapan tingkatan, secara umum terbagi dalam tiga derajat: (1) Tidak partisipatif; (2) Derajat semu dan kekuatan masyarakat. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 Tangga Partisipasi Masyarakat menurut Arnstein

Tangga partisipasi yang telah digambarkan diatas, akan peneliti jelaskan sebagai berikut.

a. Manipulasi

Pada tangga partisipasi ini bisa diartikan relatif tidak ada komunikasi apalagi dialog; tujuan sebenarnya bukan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program tapi untuk mendidik atau “menyembuhkan” partisipan (masyarakat tidak tahu sama sekali terhadap tujuan, tapi hadir dalam forum).

b. Terapi

Pada tangga partisipasi ini telah ada komunikasi namun bersifat terbatas. Inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah.

c. Informasi

Pada jenjang ini komunikasi sudah mulai banyak terjadi tapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal balik. Informasi telah diberikan kepada masyarakat tetapi masyarakat tidak diberikan kesempatan melakukan tanggapan balik (feed back).

d. Konsultasi

Pada tangga partisipasi ini komunikasi telah bersifat dua arah, tapi masih bersifat partisipasi yang ritual. Sudah ada penjangkaran aspirasi, telah ada aturan pengajuan usulan, telah ada harapan bahwa aspirasi masyarakat akan didengarkan, tapi belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan dilaksanakan ataupun perubahan akan terjadi.

e. Penentrman

Pada level ini komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dipersilahkan untuk memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan. Namun pemerintah tetap menahan kewenang untuk menilai kelayakan dan keberadaan usulan tersebut.

f. Kemitraan

Pada tangga partisipasi ini, pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar. Kekuasaan telah diberikan dan telah ada negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Kepada masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses untuk proses pengambilan keputusan diberikan kesempatan untuk bernegosiasi dan melakukan kesepakatan.

g. Pendelegasian Kekuasaan

Ini berarti bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa kepentingannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program.

h. Pengendalian warga

Dalam tangga partisipasi ini, masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingannya sendiri, yang disepakati bersama, dan tanpa campur tangan pemerintah.

Tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan sebagai derajat tokenisme dimana peran serta masyarakat diberikan kesempatan untuk berpendapat dan didengar pendapatnya, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Peran serta pada jenjang ini memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Tiga tangga akhir dikategorikan sebagai bentuk yang sesungguhnya dari partisipasi dimana masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

2.3 Pemeliharaan

Suatu barang yang dibuat oleh manusia, sejatinya apabila digunakan terus menerus akan mengalami penurunan kualitas terhadap barang itu sendiri, bahkan terjadi kerusakan. Suatu barang yang mengalami kerusakan, maka tidak dapat digunakan seperti barang yang masih baru. Oleh karena itu, diperlukan pemeliharaan agar barang tersebut dapat bertahan lama, sehingga kualitas penggunaan terhadap barang tersebut tetap terjaga dengan baik. Menurut Corder, (dalam terjemahan Hadi, 1996:1), secara alamiah tidak ada barang yang dibuat oleh manusia yang tidak bisa rusak, tetapi usia kegunaannya dapat diperpanjang dengan melakukan perbaikan berkala dengan suatu aktivitas yang dikenal sebagai pemeliharaan. Tujuan dari pemeliharaan yaitu,

- a) untuk memperpanjang usia kegunaan asset (yaitu setiap bagian dari suatu tempat kerja, bangunan dan isinya), b) untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk

produksi (atau jasa) dan mendapatkan laba investasi (return of investment) maksimum yang mungkin, c) untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu, misalnya unit cadangan, unit pemadam kebakaran dan penyelamat, dan sebagainya, d) untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut.

Corder (dalam terjemahan Hadi, 1996:3) menambahkan bahwa pemeliharaan sendiri terbagi dalam dua bentuk, yaitu pemeliharaan terencana dan pemeliharaan tak terencana. Pemeliharaan terencana terbagi dua bagian, yaitu pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan korektif. Pemeliharaan pencegahan merupakan pemeriksaan terhadap suatu objek yang berdasarkan pada apa yang dilihat, apa yang dirasakan dan apa yang didengarkan. Dalam pemeliharaan pencegahan tersebut juga disertai dengan penggantian komponen yang dinilai kurang pada saat pemeriksaan. Jadi, apabila pada saat pemeriksaan ditemukan komponen yang rusak, maka segera diambil tindakan untuk mengganti komponen tersebut.

Pemeliharaan korektif merupakan pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu bagian yang telah terhenti untuk memenuhi suatu kondisi yang bisa diterima. Suatu bagian atau komponen yang perlu untuk diganti apabila komponen atau bagian tersebut tidak dapat beroperasi dengan baik. Pemeliharaan tak terencana adalah pemeliharaan darurat, artinya pemeliharaan ini harus segera dilakukan untuk mencegah akibat yang serius. Suatu bagian yang tidak berfungsi dengan baik dan hal itu bisa berpotensi mengakibatkan kerusakan total atau mengganggu aktivitas secara keseluruhan, maka bagian tersebut harus segera diganti oleh bagian yang baru. Penggantian ini dimaksudkan untuk mencegah akibat yang bisa terjadi, sehingga dapat menunjang aktivitas yang dilakukan.

Konsep pemeliharaan yang telah disampaikan diatas memang merupakan pemeliharaan terhadap peralatan industri. Menurut peneliti, antara peralatan industri dan jalan memiliki satu persamaan. Persamaannya adalah peralatan industri dan jalan merupakan suatu sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang

diinginkan. Peralatan industri dapat membantu pabrik dalam kegiatan produksi, seperti memproduksi kertas, memproduksi makanan dan memproduksi bahan hasil produksi lainnya demi tujuan organisasi tersebut. Seperti halnya peralatan industri, jalan merupakan sarana yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya. Peralatan industri dan jalan, apabila digunakan secara terus menerus, maka dapat mengalami penurunan kualitas. Hal itu dikarenakan keduanya merupakan buatan manusia, sehingga suatu barang yang dibuat oleh manusia akan mengalami kerusakan. Penurunan kualitas peralatan industri dapat memberikan pengaruh terhadap kegiatan produksi suatu pabrik, sedangkan infrastruktur jalan yang mengalami penurunan kualitas dapat memberikan hambatan bagi pengguna jalan tersebut, sehingga hal itu dapat mempengaruhi kegiatan mereka sehari-hari. Waktu perjalanan yang dihabiskan dengan kondisi jalan yang normal hanya ditempuh selama 10 menit, tetapi ketika jalan rusak waktu perjalanannya menjadi 20 menit perjalanan, hal ini tentu akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, konsep pemeliharaan yang diterapkan pada peralatan industry, seharusnya juga dapat diterapkan pada jalan. Hal itu dikarenakan tujuan dari pemeliharaan tersebut adalah agar kedua sarana tersebut dapat digunakan dengan baik, dalam menunjang suatu kegiatan.

Berdasarkan lingkup partisipasi masyarakat yang telah disampaikan sebelumnya, maka masyarakat dapat berpartisipasi didalam kegiatan pembangunan berupa: a) pikiran, b) tenaga, c) keahlian, d) barang, e) uang. Oleh karena itu, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat tersebut juga dapat diberlakukan dalam kegiatan pemeliharaan proyek pembangunan yang telah dilaksanakan. Peneliti akan menjelaskan penerapan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan sebagai berikut.

- a. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran. Hal ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan mengemukakan ide dan gagasannya dalam kegiatan

- pemeliharaan produk pembangunan, dalam hal ini adalah infrastruktur berupa jalan. Ide dan gagasan yang disampaikan oleh masyarakat dapat berupa ide tentang penanganan terhadap kerusakan jalan, maupun memberikan sumbang saran untuk bahan material, serta perencanaan keuangan yang akan digunakan untuk mengganti bagian jalan yang rusak.
- b. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga. Hal ini dapat dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, atau dalam pengerjaan perbaikan jalan yang rusak. Masyarakat dapat membantu dalam kegiatan perbaikan jalan, apabila terjadi kerusakan terhadap jalan tersebut. Banyaknya tenaga yang terlibat didalam kegiatan perbaikan jalan, maka dapat mempercepat kegiatan perbaikan jalan, sehingga jalan itu pun dapat segera digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
 - c. Partisipasi masyarakat dalam bentuk keahlian. Keahlian merupakan suatu kemahiran yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu bidang ilmu. Salah satunya adalah keahlian dibidang infrastruktur. Seseorang yang memiliki keahlian dibidang tersebut dapat membantu kegiatan yang berkaitan dengan infrastruktur, terutama kegiatan pemeliharaan atau kegiatan perbaikan terhadap infrastruktur, sehingga nantinya dalam kegiatan pemeliharaan atau kegiatan perbaikan infrastruktur, dapat dilakukan dengan baik dan hasilnya pun juga baik.
 - d. Partisipasi masyarakat dalam bentuk barang. Barang merupakan sesuatu yang memiliki wujud. Hal ini dapat berupa: batu, pasir, dan semen. Masyarakat dapat menyumbangkan partisipasinya dengan memberikan bahan material tersebut, yang akan digunakan untuk pemeliharaan jalan maupun untuk memperbaiki jalan yang rusak.
 - e. Partisipasi masyarakat dalam bentuk uang. Pada umumnya uang merupakan sesuatu yang diterima sebagai alat pembayaran atas pembelian jasa atau barang. Masyarakat akan membutuhkan uang tersebut untuk melakukan pembelian terhadap barang-barang yang digunakan untuk kegiatan

pemeliharaan maupun perbaikan jalan. Selain digunakan untuk pembelian barang, uang dapat digunakan untuk membayar jasa dari tenaga yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan maupun kegiatan perbaikan jalan tersebut.

2.4 Infrastruktur

Menurut Grigg (dalam Kodoatie, 2005:8) infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Infrastruktur dapat dibagi menjadi 13 kategori yang meliputi:

- a. Sistem penyediaan air : waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, fasilitas pengolahan air;
- b. Sistem pengelolaan limbah : pengumpul, pengolahan, pembuangan daur ulang;
- c. Fasilitas pengelolaan limbah (padat);
- d. Fasilitas pengendalian banjir, drainase, dan irigasi;
- e. Fasilitas lintas air dan navigasi;
- f. Fasilitas transportasi: jalan, rel, bandar udara. Termasuk didalamnya adalah tanda-tanda lalu lintas, fasilitas pengontrol;
- g. Sistem transit publik;
- h. Sistem kelistrikan : produksi dan distribusi;
- i. Fasilitas gas alam;
- j. Gedung publik : sekolah, rumah sakit;
- k. Fasilitas perumahan publik;
- l. Taman kota sebagai daerah resapan, tempat bermain termasuk stadion;
- m. Komunikasi.

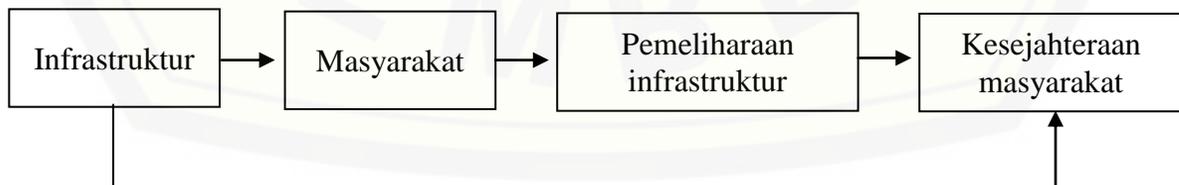
Infrastruktur tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tujuh grup, yaitu:

1. Grup transportasi (jalan, jalan raya, jembatan);
2. Grup pelayanan transportasi (transit, bandara, pelabuhan);
3. Grup komunikasi;
4. Grup keairan (air, air buangan, system keairan, termasuk jalan air yaitu sungai, saluran terbuka, pipa);
5. Grup pengelolaan limbah (system pengelolaan limbah padat);
6. Grup bangunan;
7. Grup distribusi dan produksi energi.

2.5 Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan usaha atau kegiatan dari masyarakat dalam pemeliharaan proyek pembangunan yang telah dilaksanakan melalui Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP). Dalam penelitian ini, peneliti membuat sebuah kerangka konseptual yang menjadi kerangka pemikiran peneliti dalam melakukan penelitian dan menjawab permasalahan yang dibicarakan.

Miles dan Hubberman (1992:31) menjelaskan bahwa suatu kerangka konseptual memaparkan dimensi kajian yang utama, yaitu faktor-faktor kunci, atau variabel-variabel, hubungan-hubungan antara dimensi-dimensi tersebut yang telah diperkirakan sebelumnya.



Gambar 2.2 Kerangka Berfikir Penelitian

Infrastruktur merupakan suatu sarana yang dapat menunjang kegiatan masyarakat, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun, sejalan dengan berjalannya waktu, infrastruktur yang digunakan secara terus menerus, mengakibatkan penurunan kualitas pada infrastruktur, sehingga mempengaruhi kinerja dari infrastruktur tersebut. Oleh karena itu, masyarakat disamping menikmati infrastruktur, juga dituntut untuk melakukan pemeliharaan infrastruktur, terutama infrastruktur yang dibangun secara partisipatif. Pemeliharaan ini bertujuan agar infrastruktur dapat terjaga kualitasnya, sehingga tujuan dari pembangunan infrastruktur tersebut dapat tercapai.

BAB. 3 METODOLOGI PENELITIAN

Metode dalam rancangan penelitian kualitatif sesungguhnya tidak dituntut untuk dirinci sedemikian rupa. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih pada penegasan dan penjelasan yang menunjuk pada prosedur-prosedur umum kemetodean yang akan digunakan. Seperti (1) pendekatan berikut alasan mengapa pendekatan itu digunakan; (2) unit analisis; (3) metode pengumpulan dan analisis data; dan (4) keabsahan data (Bungin, 2012:47). Terdapat variasi lain dalam penggunaan teknik-teknik dalam melakukan penelitian. Secara terperinci, tanpa menghilangkan metode yang dijelaskan oleh Burhan Bungin di atas, berikut adalah teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Moleong (2012:6) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Seperti uraian di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang berusaha menggambarkan kegiatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jalan paving yang dibangun melalui program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman (P4IP).

3.2 Fokus Penelitian

Di dalam rancangan penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian dan/ atau pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Abdul Aziz (dalam Bungin, 2012:41-42) menjelaskan suatu fenomena dan praktik-praktik sosial yang layak diangkat sebagai fokus kajian penelitian adalah fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi, dilihat dari perspektif ilmu pengetahuan. Fenomena tersebut juga mengisyaratkan terdapat “ketidakberesan sosial” tertentu yang menarik sehingga memerlukan pemotretan, pemetaan, dan pemahaman yang mendalam untuk pada gilirannya dapat membantu memecahkannya.

Berdasarkan pada pemahaman mengenai fokus kajian tersebut, maka fokus penelitian pada kajian ini adalah untuk meneliti partisipasi masyarakat desa Karanganyar, khususnya kegiatan partisipasi masyarakat untuk pemeliharaan jalan paving yang sudah dibangun bersama. Hal itu dikarenakan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek pembangunan sering dilupakan, akibatnya proyek yang telah dibangun tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama (Mardikanto dan Soebiato, 2012:83).

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian merupakan suatu *setting* yang diperlukan untuk membatasi lokasi dan waktu dalam penelitian. Penelitian kualitatif yang dilakukan pada setting sosial tertentu tidak dimaksudkan untuk mewakili atau sebagai representasi dari latar tertentu. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif sangat kontekstual dan lebih berupaya untuk menelaah fenomena sosial pada level mikro, dan tidak bermaksud melakukan generalisasi (Bungin, 2012:45). Pada penelitian ini, peneliti menetapkan Desa Karang Anyar sebagai tempat penelitian, karena diantara

desa-desa di kabupaten Jember, hanya desa Karang Anyar yang memperoleh P4IP. Penelitian ini akan dilakukan setelah seminar proposal dilakukan.

3.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan melalui kegiatan observasi yang telah dilakukan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah diolah oleh instansi atau lembaga yang bersangkutan.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah proposal kegiatan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) yang diperoleh dari kantor desa Karang Anyar.

3.5 Penentuan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *sampling purposive*. Menurut Sugiyono (2011:85), teknik *sampling purposive* merupakan teknik penentuan sampel yang didasari atas pertimbangan tertentu. Berikut kriteria informan yang baik, yaitu:

- a. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui.
- b. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti.
- c. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- d. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya.
- e. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai seorang narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Dalam penelitian ini, informan yang dipilih oleh peneliti adalah sebagai berikut, yaitu.

- a. Kepala Desa Karang Anyar;
- b. Kepala Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) desa Karang Anyar, selaku koordinator pelaksana program;
- c. Ketua KSM;
- d. Masyarakat sekitar jalan yang dijadikan sasaran pemasangan paving.

3.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik dan instrument pengumpulan data ini merupakan bagian penting dalam kegiatan penelitian. Hal itu dikarenakan dengan menggunakan teknik dan instrumen yang baik, dapat menunjang kegiatan penelitian dengan lancar. Berikut teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan, yaitu.

- a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keterangan dari informan yang bersangkutan, juga merupakan kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai data yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara mendalam. Seperti yang disampaikan oleh Faisal (dalam Bungin, 2012:67), dengan wawancara mendalam, bisa digali apa yang tersembunyi di sanubari seseorang, apa yang menyangkut masa lampau, masa kini, maupun masa depan. Dalam hal ini yang diperlukan adalah wawancara tidak terstruktur yang dapat secara leluasa melacak berbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkap mungkin dan semendalam mungkin. Lalu, peneliti menggunakan alat tulis sebagai instrumen yang digunakan untuk memperoleh data melalui pencatatan hasil wawancara yang akan dilakukan.

b. Observasi

Kegiatan observasi dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya yang ada di lapangan. Bungin (2007:115) mengemukakan terdapat beberapa bentuk observasi dalam penelitian kualitatif, yaitu; observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi tidak berstruktur yakni observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat menggunakan daya nalarnya untuk mengamati suatu objek.

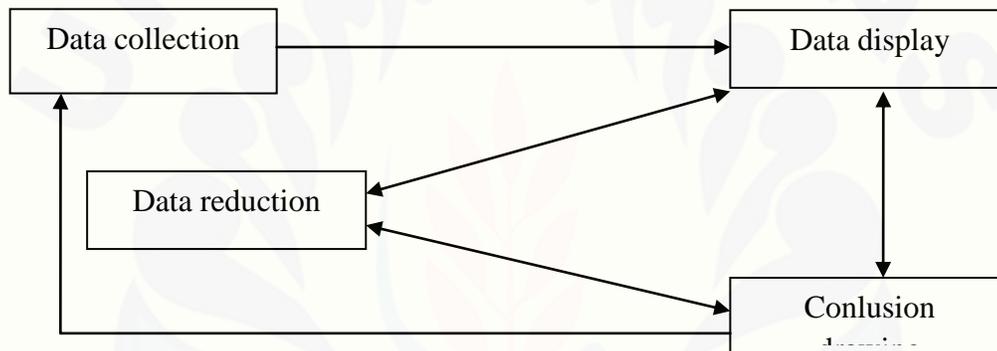
c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data. Kegiatan pengumpulan data dapat bermanfaat untuk menunjang kegiatan penelitian, dapat mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber yang lain.

Pada penelitian ini, peneliti membutuhkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan topik penelitian. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan yaitu: data tentang desa penerima program di Kabupaten Jember, peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

3.7 Teknik Analisis Data

Secara umum Miles dan Huberman (dalam Idrus, 2009:148) membuat gambaran seperti pada gambar berikut. Miles dan Huberman mengajukan model analisis data yang disebut model interaktif yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana diketahui, bahwa reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dan kegiatan analisis adalah penyajian data. Miles dan Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dan penyajian-penyajian tersebut.

Dalam pelaksanaan penelitian Miles dan Huberman yakin bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian-penyajian yang dimaksud meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna. Penyajian yang paling sering digunakan data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif.

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Miles dan Huberman (dalam Idrus, 2009:151) menyatakan bahwa dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin ada, alur sebab-akibat, dan proposisi. Lebih lanjut dinyatakan oleh Miles dan Huberman bahwa seorang peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-

kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Menurut Idrus (2009:151) bahwa penarikan kesimpulan dapat saja berlangsung saat proses pengumpulan data berlangsung, baru kemudian dilakukan reduksi dan penyajian data. Perlu ditekankan bahwa kesimpulan yang telah dibuat bukan sebagai kesimpulan final. Hal ini dikarenakan setelah proses penyimpulan tersebut, peneliti dapat saja melakukan verifikasi hasil temuan ini kembali di lapangan. Dengan begitu, kesimpulan yang diambil dapat sebagai pemicu peneliti untuk lebih memperdalam lagi proses observasi dan wawancaranya.

3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data

Teknik menguji keabsahan data menjadi salah satu bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan keabsahan suatu data akan menjadi tolak ukur ilmiah bagi penelitian. Menurut Lincoln dan Guba (dalam Bungin, 2012: 59), paling sedikit terdapat empat standar atau kriteria utama guna menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif, yaitu:

a. Standar Kredibilitas

Hasil penelitian kualitatif, agar memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta di lapangan, perlu dilakukan upaya-upaya berikut ini, yaitu:

- 1) Memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan. Hal ini mengingat peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Semakin lamanya peneliti terlibat dalam pengumpulan data, akan semakin memungkinkan meningkatnya derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

- 2) Melakukan observasi secara terus-menerus dan sungguh-sungguh, sehingga peneliti semakin mendalami fenomena sosial yang tersamar atau kasat mata, yang sulit terungkap bila hanya digali melalui wawancara.
- 3) Melakukan triangulasi, baik triangulasi metode (menggunakan lintas metode pengumpulan data), triangulasi sumber data (memilih berbagai sumber data yang sesuai) dan triangulasi pengumpul data (beberapa peneliti yang mengumpulkan data secara terpisah). Dengan penggunaan teknik triangulasi ini memungkinkan diperoleh variasi informasi seluas-luasnya atau selengkap-lengkapya. Pada penelitian ini triangulasi pengumpul data tidak digunakan, karena peneliti tidak melakukan penelitian berkelompok.
- 4) Melibatkan teman sejawat (yang tidak ikut melakukan penelitian) untuk berdiskusi, memberikan masukan, bahkan kritik mulai awal kegiatan proses penelitian sampai tersusunnya hasil penelitian. Hal ini memang perlu dilakukan, mengingat keterbatasan peneliti, yang dihadapkan pada kompleksitas fenomena sosial yang diteliti.
- 5) Melakukan analisis atau kajian kasus negative, yang dapat dimanfaatkan sebagai kasus pembandingan atau bahkan sanggahan terhadap hasil penelitian. Dalam beberapa hal, kajian kasus negative ini akan lebih mempertajam temuan penelitian.
- 6) Melacak kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis data.
- 7) Mengecek bersama-sama dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data, baik tentang data yang telah dikumpulkan, kategorisasi analisis, penafsiran dan kesimpulan hasil penelitian.

b. Standar Transferabilitas

Standar ini merupakan modifikasi validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Standar ini merupakan bentuk pernyataan empiric yang tidak dapat dijawab oleh peneliti kualitatif itu sendiri, tetapi dijawab dan dinilai oleh pembaca laporan penelitian. Hasil penelitian kualitatif memiliki standar transferabilitas yang tinggi bilamana para pembaca laporan penelitian ini memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian.

c. Standar Dependabilitas

Standar dependabilitas boleh dikatakan mirip dengan standar reliabilitas. Adanya pengecekan atau penilaian akan ketetapan peneliti dalam mengkonseptualisasikan apa yang diteliti merupakan cerminan dari kemantapan dan ketetapan menurut standar reliabilitas penelitian. Maka konsisten peneliti dalam keseluruhan proses penelitian, baik dalam pengumpulan data, interpretasi temuan maupun dalam melaporkan hasil penelitian, akan semakin memenuhi standar dependabilitas. Salah satu upaya untuk menilai dependabilitas adalah dengan melakukan audit dependabilitas itu sendiri. Ini dapat dilakukan oleh auditor yang independen, dengan melakukan review terhadap seluruh hasil penelitian.

d. Standar Konfirmabilitas

Standar konfirmabilitas ini lebih terfokus pada audit kualitas dan kepastian hasil penelitian, apa benar berasal dari pengumpulan data di lapangan. Audit konfirmabilitas ini biasanya dilakukan bersamaan dengan audit dependabilitas.

Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan data, maka peneliti akan menggunakan standar kredibilitas. Hal itu dikarenakan upaya-upaya yang ditentukan dalam standar kredibilitas sudah mampu mewakili untuk menguji keabsahan data.

Tabel 3.1 Teknik Pemeriksaan Data Kualitatif Moleong

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (derajat kepercayaan)	1. Perpanjangan keikut-sertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensial 6. Kajian kasus negative 7. Pengecekan anggota
Kepastian	8. Uraian rinci
Kebergantungan	9. Audit kebergantungan
Kepastian	10. Audit kepastian

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Desa Karanganyar adalah salah satu desa di Kecamatan Ambulu, desa ini terletak di bagian selatan wilayah Kabupaten Jember. Desa ini berada \pm 15 km dari jalan simpang empat Pasar Mangli menuju ke arah selatan, dengan waktu tempuh sekitar 30 menit menggunakan sepeda motor. Perjalanan menuju desa tersebut terbilang cukup mudah, karena dari simpang empat Pasar Mangli langsung menuju ke arah selatan, dan berjalan mengikuti jalan utama ke arah wisata Watu Ulo. Desa ini terletak di bagian pinggir jalan utama tersebut, sehingga peneliti dengan mudah menemukan desa tanpa bertanya kepada orang lain. Akses jalan menuju Desa Karanganyar terlihat beraspal, dan mulus sehingga nyaman untuk dilewati. Selain dapat diakses dengan kendaraan pribadi, tepatnya di simpang tiga Ajung, terdapat kendaraan umum yang menuju ke arah Ambulu. Kendaraan umum ini terlihat mulai beroperasi pada jam 7 pagi sampai sore. Biasanya tampak terlihat mengantarkan pedagang yang berjualan di pasar yang terletak berdekatan dengan tempat mereka memarkirkan kendaraannya. Berdasarkan profil Desa Karanganyar, desa ini memiliki luas 1.460 Ha yang memiliki batas-batas sebagai berikut.

- a. Batas sebelah Utara : Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah;
- b. Batas sebelah Selatan : Desa Ambulu Kecamatan Ambulu;
- c. Batas sebelah Barat : Perhutani Kecamatan Wuluhan;
- d. Batas sebelah Timur : Desa Pontang Kecamatan Ambulu.

Kantor Desa Karanganyar berada \pm 1 km dari Pasar Karanganyar, kantor desa ini terletak di sebelah kanan jalan, bersebelahan dengan puskesmas. Jarak kantor desa dengan kantor Kecamatan Ambulu \pm 3 km ke arah selatan, melalui jalan utama yang menuju wisata Watu Ulo. Saat ini Desa Karanganyar dipimpin oleh Bapak Sunaryo, yang saat ini merupakan periode keduanya menjabat sebagai Kepala Desa. Pada saat peneliti berkunjung ke kantor Desa Karanganyar untuk menyampaikan ijin observasi awal, peneliti disambut baik oleh kepala desa Karanganyar tersebut. Ketika peneliti menyampaikan ijin observasi awal untuk P4IP, bapak Suryono mengatakan kepada peneliti untuk langsung menemui koordinator dari pelaksanaan program tersebut,

“kalau mau minta data atau informasi tentang P4IP, langsung ke Pak Aziz mas, karena yang menjadi koordinator pelaksanaannya beliau”

Jadi, oleh Bapak Suryono, peneliti diminta langsung menemui koordinator dari program tersebut, yaitu Bapak Baitul Aziz. Selain menjadi koordinator pelaksana P4IP, beliau juga menjadi ketua LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) di Desa Karanganyar. Setelah mendapat petunjuk dari bapak Suryono, peneliti langsung menemui beliau yang kebetulan berada di kantor desa tersebut. Saat pertemuan ini, kami tidak mengobrol begitu lama, jadi ketika peneliti selesai menyampaikan keperluannya untuk meminta data tentang P4IP, bapak Aziz langsung mencari dokumen tentang program tersebut. Dalam waktu yang singkat, bapak Aziz kembali kepada peneliti dengan membawa dua buah proposal kegiatan P4IP di Desa Karanganyar. Beliau sempat memberikan sedikit penjelasan, kenapa di desanya mendapatkan program tersebut,

“dokumen ini berisi tentang pelaksanaan program mulai awal. Program ini berasal dari pemerintah pusat mas, kami sendiri merasa beruntung bisa terpilih sebagai penerima program. Mungkin pemerintah menilai desa kami, layak untuk memperoleh bantuan.”

Setelah mendengar sedikit penjelasan bapak Aziz tentang P4IP di yang dilaksanakan di desanya, peneliti meminta ijin kepada bapak Aziz untuk mengkopi

dokumen tentang P4IP ini, dan begitu peneliti diizinkan, peneliti segera keluar kantor desa, pergi mencari tempat percetakan untuk mengkopi dokumen P4IP tersebut. Proposal kegiatan P4IP yang telah peneliti dapatkan, berisikan kegiatan yang berkaitan dengan P4IP, juga didalam proposal tersebut disebutkan pula tempat-tempat yang dijadikan sasaran program.

Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa di dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa. Menurut UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, didalam pasal 1 dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan. Dengan adanya dusun tersebut dapat mempermudah pelaksanaan pemerintah desa itu sendiri. Berdasarkan profil Desa Karanganyar, desa ini terbagi dalam tiga dusun, yaitu.

- a. Dusun Sumberan : terdiri dari 8 RW dan 35 RT;
- b. Dusun Krajan : terdiri dari 7 RW dan 21 RT;
- c. Dusun Sentong : terdiri dari 6 RW dan 28 RT.

Diantara ketiga dusun diatas, dusun Sumberan terlihat sebagai dusun yang terbanyak memiliki RW dan RT. Keberadaan jumlah RW dan RT yang ada di Dusun Sumberan, mengindikasikan bahwa jumlah penduduk yang ada di dusun tersebut lebih banyak jika dibandingkan dengan kedua dusun yang lain. Hal ini sesuai dengan yang ditampilkan pada tabel 1.1 tentang jumlah penduduk di Desa Karanganyar. Ketiga dusun tersebut masing-masing dikepalai oleh satu orang, yaitu Dusun Sumberan oleh Bapak Siswanto, Dusun Krajan oleh Bapak Sujarno, dan Dusun Sentong oleh Bapak Baitul Aziz.(lihat lampiran)

Telah disampaikan diatas bahwa dusun merupakan bagian dari lingkungan pemerintahan desa. Jadi diharapkan dengan adanya pembagian pemerintahan per dusun tersebut, dapat memudahkan kepala desa dalam membuat suatu peraturan atau kebijakan bagi desa itu sendiri, sehingga pembangunan desa diharapkan dapat terlaksanakan dengan baik. Dukungan yang baik dari masyarakat desa terhadap

program-program yang dibuat oleh pemerintah desa juga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa.

Berdasarkan profil Desa Karanganyar, wilayah dataran Desa Karanganyar rata-rata terletak di ketinggian 18 mdl dari permukaan laut dengan dataran yang menghampar seluas ± 1460 Ha, terdiri dari.

- a. Tanah sawah : 504 Ha
- b. Tanah ladang dan tegalan : 380 Ha
- c. Permukiman : 286 Ha
- d. Lainnya : 290 Ha
- e. Curah Hujan : < 2000 Mm
- f. Jumlah bulan hujan : 4 bulan
- g. Suhu rata-rata : $23^{\circ} - 32^{\circ} C$

Dari data diatas, diperlihatkan bahwa sebagian besar wilayah Desa Karanganyar merupakan tanah pertanian, seperti sawah dan lading. Dengan kondisi alam yang sebagian besar merupakan tanah persawahan, sebagian besar dari masyarakat Desa Karanganyar memanfaatkan kondisi alam tersebut untuk bercocok tanam, seperti bertani, berladang, dan sebagainya. Dari observasi yang peneliti lakukan, sebagian besar lahan tersebut ditanami padi. Selain ditanami padi, ada juga sebagai tanah tersebut ditanami oleh jagung dan tembakau. Di Desa Ambulu sendiri merupakan desa yang memiliki peninggalan gudang tembakau yang sudah ada sejak pemerintahan Belanda. Gudang-gudang tersebut ada yang sampai saat ini masih aktif digunakan. Oleh karena itulah mengapa di sebagian tanah yang berada di Desa Karanganyar ada yang ditanami tembakau. Salah satu tanaman pertanian, yaitu padi merupakan salah satu tanaman yang ditemukan di sebagian wilayah Desa Karanganyar. Padi atau beras yang nantinya dapat diolah menjadi nasi, nasi merupakan salah satu makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Di Indonesia sendiri, nasi menjadi komoditi teratas yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Seperti yang ditampilkan pada tabel komoditi sebagai berikut.

Tabel 4.1 Rata-rata Konsumsi Kalori (KKal) per Kapita Sehari Menurut Kelompok Makanan 2011-2013

No.	Komoditi	2011	2012	2013
		September	September	September
1.	Padi-padian	893,30	886,84	869,36
2.	Umbi-umbian	36,02	32,27	35,04
3.	Ikan	45,61	47,26	45,45
4.	Daging	44,19	61,62	38,47
5.	Telur dan susu	52,21	50,25	53,19
6.	Sayur-sayuran	37,52	37,90	36,71
7.	Kacang-kacangan	50,67	55,12	46,80
8.	Buah-buahan	33,89	35,12	30,39
9.	Minyak dan lemak	229,86	242,88	231,08
10.	Bahan minuman	93,74	84,02	88,54
11.	Bumbu-bumbuan	15,90	84,40	14,66
12.	Konsumsi lainnya	53,91	14,03	50,34
13.	Makanan jadi	266,02*)	265,67*)	288,37*)
14.	Minuman beralkohol	-	-	-
15.	Tembakau dan sirih	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		1 852,84	1 865,30	1 828,41

Sumber: www.bps.go.id

Dari tabel diatas, mengindikasikan bahwa beras atau padi masih tetap menjadi makanan pokok favorit masyarakat di Indonesia. Konsumsi untuk beras selama tiga tahun terlihat mengalami penurunan, akan tetapi apabila dibandingkan dengan komoditi yang lain, beras tetap menjadi komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita. Oleh karena itu, dengan luas lahan pertanian dimiliki oleh Desa Karanganyar, diharapkan dapat menjadikan desa ini sebagai salah satu lumbung padi nasional. Dengan dukungan alam seperti ini membuat sebagian dari masyarakat desa berprofesi sebagai buruh tani, mengingat data diatas bahwa konsumsi beras oleh masyarakat di Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan komoditi yang lainnya. Hal ini diharapkan akan menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat sekitar Desa Karanganyar, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi warganya khususnya bagi mereka yang berprofesi sebagai buruh tani di lahan pertanian tersebut. Selain tanaman padi, ada juga tanaman lain yang peneliti temukan ketika melakukan observasi lapangan, seperti singkong dan kacang-kacangan. Dari apa yang

sudah peneliti lihat, bahwa ini sebagai salah satu tanda masyarakat Desa Karanganyar begitu memanfaatkan lahan yang ada di desanya. Ini tentu menjadi nilai plus bagi desa tersebut, karena selain nampak sebagai lahan penghijauan, dengan adanya tanaman-tanaman tersebut dapat memberikan manfaat bagi warga Desa Karanganyar.

Dalam penelitian yang peneliti lakukan, peneliti juga memperoleh data tentang jumlah penduduk Desa Karanganyar. Menurut UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di dalam pasal 2 ayat 1 bahwa penduduk merupakan salah satu unsur penting dalam pembentukan suatu desa, selain mempertimbangkan luas wilayah dan persyaratan-persyaratan yang lain yang akan ditentukan melalui peraturan Menteri Dalam Negeri.

Tabel 4.2 Jumlah penduduk Desa Karanganyar per dusun

No	Dusun	Jumlah penduduk		Jumlah
		L	P	
1.	Dusun Sumberan	2736	2721	5453
2.	Dusun Krajan	2098	2064	4162
3.	Dusun Sentong	2480	2588	5068
	Jumlah	7314	7373	14687

Sumber: Kantor Desa Karanganyar

Jumlah penduduk pada tabel penduduk Desa Karanganyar diatas, memperlihatkan bahwa jumlah penduduk yang berada di desa tersebut cukup banyak dan penyebaran penduduk di Desa Karanganyar pada tiap-tiap Dusun tersebut dapat dikatakan merata. Hal itu diperlihatkan bahwa tidak ada ketimpangan yang jauh antara jumlah penduduk pada satu dusun dengan dusun lainnya. Dusun Sumberan merupakan dusun yang berpenduduk lebih banyak dibandingkan dua dusun lainnya, yaitu Dusun Krajan dan Dusun Sentong. Apabila dilihat jumlah penduduk dari ketiga dusun tersebut, yaitu: Dusun Sumberan, Dusun Krajan, dan Dusun Sentong, jumlah penduduk yang ada sudah memenuhi syarat suatu wilayah yang ingin menjadi suatu

desa. Seperti yang disampaikan melalui UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, di dalam pasal 8 bahwa ada persyaratan untuk pembentukan desa, yaitu.

- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk, yaitu:
 - 1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 - 2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - 3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - 4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 - 5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
 - 6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - 7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - 8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
 - 9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;

- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan yang telah disampaikan diatas, nampak bahwa suatu wilayah agar bisa menjadi desa, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya penduduk. Dimana dimasing-masing pulau yang ada di Indonesia memiliki perbedaan mengenai jumlah penduduk yang harus dipenuhi untuk menjadi sebuah desa. Pulau Jawa sendiri ditentukan jumlah penduduk yang harus dipenuhi agar menjadi sebuah desa adalah paling sedikit 6000 (enam ribu) jiwa atau 1200 (seribu dua ratus) kepala keluarga. Jumlah penduduk Desa Karanganyar sendiri, seperti yang tercantum pada tabel 1.2 sebanyak 14687 (empat belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh). Hal itu berarti jumlah penduduk tersebut telah memenuhi persyaratan untuk menjadi sebuah desa.

Jumlah penduduk yang terhitung di tabel 1.2, nampak bahwa Dusun Sumberan merupakan dusun yang memiliki penduduk terbanyak dibandingkan dengan Dusun Krajan dan Dusun Sentong. Demikian pula dengan jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Karanganyar. Seperti yang ditampilkan pada tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 4.3 Jumlah kepala keluarga (KK) per dusun

No.	Dusun	Dusun Kepala Keluarga per Dusun
1.	Dusun Sumberan	1285
2.	Dusun Krajan	949
3.	Dusun Sentong	1187
	Jumlah	3421

Sumber: Kantor Desa Karanganyar

Tabel diatas nampak bahwa Dusun Sumberan merupakan dusun yang memiliki jumlah kepala keluarga terbanyak dibandingkan dengan Dusun Krajan dan Dusun Sentong. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia online bahwa posisi kepala keluarga biasanya diberikan kepada ayah atau bapak, artinya ayah atau bapak tersebut bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dari pengertian tersebut, jumlah kepala keluarga yang terhitung pada tabel di atas, memperlihatkan bahwa sebagian jumlah penduduk laki-laki yang terhitung di Desa Karanganyar berperan sebagai kepala keluarga. Hal itu tidak menutup kemungkinan kepala keluarga yang diperankan oleh seorang ibu. Pada penjelasan sebelumnya, telah disampaikan bahwa kepala keluarga adalah sebagai penanggung jawab di keluarga tersebut. Hal ini dapat diindikasikan sebagai sosok yang dapat melindungi keluarganya, dan juga sebagai orang yang memberikan nafkah bagi keluarganya.

Seperti yang telah disampaikan diatas bahwa peran kepala keluarga biasanya dipegang oleh bapak atau ayah. Akan tetapi, di tempat lain seperti berita yang dimuat oleh media online, tv.okezone.com. Media online tersebut menampilkan sosok anak yang bernama Taspirin, usianya 13 tahun. Seperti yang diberitakan, anak tersebut berperan sebagai kepala keluarga. Hal itu mengindikasikan bahwa anak tersebut memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Seperti yang diberitakan pula, bahwa setiap harinya anak tersebut bekerja di sawah untuk memenuhi kebutuhan ibu dan ketiga adiknya. Apabila melihat apa yang dilakukan oleh anak tersebut, hal ini dapat membuktikan bahwa peran dari kepala keluarga adalah untuk melindungi

keluarganya, atau bertanggung jawab bagi keluarganya. Peran untuk melindungi keluarganya disini dapat diartikan melindungi keluarga dari kemungkinan bahaya yang mengancam, seperti gangguan dari orang lain maupun bentuk gangguan yang lain. Selain itu pula, dapat diartikan melindungi keluarga dari kelaparan. Jadi seperti yang dilakukan oleh anak 13 tahun tersebut melindungi keluarganya dari kelaparan. Seperti yang telah dimuat oleh media online tersebut diatas, bahwa untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya, anak 13 tahun tersebut bekerja setiap hari di sawah agar bisa memenuhi kebutuhan ibu dan ketiga adiknya.

Dari peristiwa diatas, dapat mengindikasikan bahwa peran dari kepala keluarga dapat dikatakan begitu kompleks. Kompleks disini dapat diartikan, kepala keluarga ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan perlindungan yang tidak hanya perlindungan dari gangguan yang bisa mengancam keselamatan keluarganya. Selain memberikan perlindungan dari ancaman gangguan, tetapi juga dapat memberikan jaminan pangan bagi keluarganya. Seperti kisah diatas, untuk memberikan jaminan pangan bagi keluarganya, seorang kapala keluarga bekerja keras agar dapat memperoleh penghasilan. Penghasilan yang didapat tersebut, nantinya dapat digunakan untuk membeli produk-produk makanan, seperti: beras dan lauk pauk. Penghasilan yang diperoleh dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain, seperti kebutuhan sekolah atau kebutuhan kesehatan.

Bantuan program pembangunan yang diterima oleh Desa Karanganyar, disalurkan seluruhnya untuk pembangunan jalan paving. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil rebug warga yang sudah dilaksanakan, bahwa masyarakat miskin yang berada di Desa Karanganyar membutuhkan sarana jalan yang memadai, karena selama ini jalan yang ada, sulit dilewati ketika hujan turun. Jalan yang permukaannya tanah, akan becek ketika hujan turun. Jalan yang becek tidak akan bisa digunakan dengan baik, sehingga menghambat kegiatan warga sekitar. Jalan paving yang dibangun oleh masyarakat Desa Karanganyar tersebut, tersebar di beberapa tempat, yaitu Dusun Krajan (3 titik pengerjaan: RT 01 RW 11, RT 02 RW 15, RT 03 RW 06) dengan panjang keseluruhan mencapai 609,1 m dan lebar jalan yang bervariasi mulai

1 m sampai 2 m, Dusun Sentong (2 titik pengerjaan: RT 03 RW 20, RT 05 RW 20) dengan panjang keseluruhan mencapai 280,1 m dan lebar 2 m, dan Dusun Sumberan (5 titik pengerjaan: RT 02 RW 05, RT 02 RW 06, RT 04 RW 04, RT 04 RW 05, RT 04 RW 06) dengan panjang keseluruhan mencapai 869,3 m dan lebar jalan yang bervariasi mulai 1 m sampai 2 m. Selain itu, jalan paving yang dibangun merupakan jalan yang relatif datar, yang dapat digunakan oleh pejalan kaki maupun pengguna sepeda, sepeda motor dan becak. Jalan paving yang dibangun merupakan jalan yang menghubungkan antara satu tempat ke tempat yang lain, jadi antara satu wilayah RT berhubungan dengan wilayah RT yang lain.

4.2 Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP)

Kebijakan APBN 2013 masih memberikan alokasi yang cukup besar terhadap subsidi energi seperti BBM sekitar 193,8 Triliun atau 11,5% dialokasikan untuk subsidi BBM pada APBN 2013 dimana lebih dari 50% subsidi BBM tersebut dinikmati oleh 20% orang-orang kategori mampu. Sementara hanya sekitar 2 % dari APBN dinikmati oleh masyarakat sangat miskin, miskin dan hamper miskin yang dianggarkan untuk program-program perlindungan sosial berbasis rumah tangga seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Raskin, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Karena itu kebijakan subsidi perlu diubah dari subsidi harga komoditas menjadi subsidi yang lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat sangat miskin, miskin dan hamper miskin yang membutuhkan. Selain keterbatasan subsidi anggaran untuk program-program perlindungan sosial berbasis rumah tangga (cluster I) diatas, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meluncurkan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan (P4) Infrastruktur sebagai upaya mengurangi beban hidup masyarakat miskin akibat perubahan besaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Anggaran P4 Infrastruktur tersebut berasal dari

penghematan atau pemotongan anggaran Kementerian/ Lembaga yang dihimpun Pemeritnah. Pemerintah memahami bahwa bila BBM naik maka masyarakat miskin akan mengalami dampak negatif, oleh karena itu pemerintah memberikan kompensasi kepada masyarakat akibat perubahan besaran subsidi BBM tahun 2013 untuk membantu mengurangi biaya hidup khususnya masyarakat miskin di perdesaan dan di perkotaan, dengan memberikan kemudahan akses terhadap infrastruktur melalui.

- a. penyediaan infrastruktur permukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP);
- b. penyediaan air minum untuk desa nelayan, Ibu Kota Kecamatan (IKK) rawan air, dan kawasan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, melalui Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan SPAM (P4-SPAM);
- c. pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) meliputi penyediaan air baku dan pembangunan embung untuk air minum daerah rawan air, perlindungan pantai di permukiman nelayan miskin termasuk perbaikan infrastruktur SDA akibat bencana alam, dan perbaikan irigasi kecil perdesaan dengan pemberdayaan, melalui Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur SDS (P4-ISDA).

Program P4-IP di Perkotaan dalam mendukung Program PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) dimaksudkan sebagai upaya memberikan kemudahan akses penyediaan infrastruktur permukiman di perkotaan, terutama bagi masyarakat miskin, yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Melalui penyediaan infrastruktur Permukiman di Perkotaan tersebut diharapkan masyarakat miskin di wilayah sasaran dengan cepat dapat memulihkan kembali kondisi kesejahteraan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya agar penyelenggaraan P4-IP di Perkotaan ini dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan No. 81 tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial. Pada Kementerian

Negara dan Lembaga maka perlu disusun sebuah buku petunjuk pelaksanaan yang dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan bagi pelaku di semua tingkatan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah, memberikan kemudahan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar permukiman di perkotaan, mendorong roda perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dengan terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur yang baik. Komponen kegiatan P4IP di perkotaan terdiri atas penguatan kapasitas masyarakat. Program ini akan mendukung dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memprioritaskan, merencanakan, melaksanakan, mengelola, dan memantau pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar, komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar 250 juta/ kel termasuk didalamnya untuk BOP BKM/ LKM/ LKM sebesar 5 % dari pagu BLM, Komponen pendampingan, digunakan mendukung pelaksanaan program seperti pengadaan fasilitator dan askot berikud gaji dan BOP Tim Faskel dan BOP Satker PBL Provinsi untuk sosialisasi, koordinasi pengendalian pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi program.

Prinsip-prinsip Pelaksanaan dari kegiatan ini mencakup: kelembagaan masyarakat (BKM/ LKM/ OMS) yang didukung pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mampu mengelola kegiatan P4IP di Perkotaan ini dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. partisipatif, dimana setiap tahapan proses kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban) P4IP di Perkotaan melibatkan masyarakat sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat;
- b. transparan dan akuntabel, dimana dalam setiap tahapan kegiatan P4IP di Perkotaan dilaksanakan secara terbuka dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- c. sederhana dan mudah dikerjakan, artinya jenis kegiatan dan proses pelaksanaannya diupayakan semudah mungkin dan sistematis serta bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan tetap mengacu pada ketentuan yang dipersyaratkan;

- d. berkualitas secara layak, agar pelaksanaan P4IP di Perkotaan ini tetap mengacu pada kualitas standar teknis pekerjaan umum (PU) dan petunjuk teknis pelaksanaan infrastruktur PNPM Mandiri Perkotaan.

4.2.1 Penentuan Lokasi Sasaran

Lokasi sasaran ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ KPTS/ M/ 2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Penetapan Kelurahan/ Desa sasaran Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) di Perkotaan tahun 2013 dengan jumlah lokasi 1.800 kelurahan/ desa yang tersebar di 218 kota/ kabupaten dan 33 provinsi. Lokasi sasaran P4IP di Perkotaan terbagi 2 (dua) kategori, yaitu.

- a. kategori 1 adalah lokasi sasaran kelurahan/ desa yang telah memiliki BKM/ LKM/ PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak 1.753 kelurahan/ desa;
- b. kategori 2 adalah lokasi sasaran kelurahan/ desa yang belum memiliki kelembagaan masyarakat/ sudah memiliki kelembagaan masyarakat sejenis selain BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak 47 kelurahan/ desa.

Kategori lokasi sasaran tersebut diatas akan menentukan mekanisme pelaksanaan kegiatan P4IP di Perkotaan dalam 2 (dua) bagian, yaitu.

- a. pelaksanaan untuk lokasi yang telah memiliki BKM/ LKM PNPM Mandiri Perkotaan.
- b. pelaksanaan untuk lokasi yang belum memiliki kelembagaan masyarakat/ sudah memiliki kelembagaan masyarakat sejenis selain BKM/ LKM PNPM Mandiri Perkotaan.

4.2.2 Jenis Kegiatan Infrastruktur

Jenis kegiatan yang dilaksanakan di P4IP di perkotaan ini adalah kegiatan infrastruktur yang dapat memberikan dampak manfaat langsung kepada masyarakat miskin akan kebutuhan infrastruktur dasar permukiman yang meliputi.

- a. jalan dan jembatan;
- b. tambatan perahu;
- c. penyediaan air minum;
- d. sanitasi lingkungan (drainase, saluran limbah rumah tangga, MCK/jamban, dan persampahan); dan
- e. Irigasi.

4.2.3 Jenis Kegiatan Yang Tidak Boleh di Lakukan (Negatif List)

Penggunaan dana BLM tidak boleh dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan di bidang infrastruktur dasar, menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-norma, hukum serta peraturan yang berlaku. Berikut beberapa kegiatan yang tidak boleh dibiayai dengan dana BLM P4IP di Perkotaan.

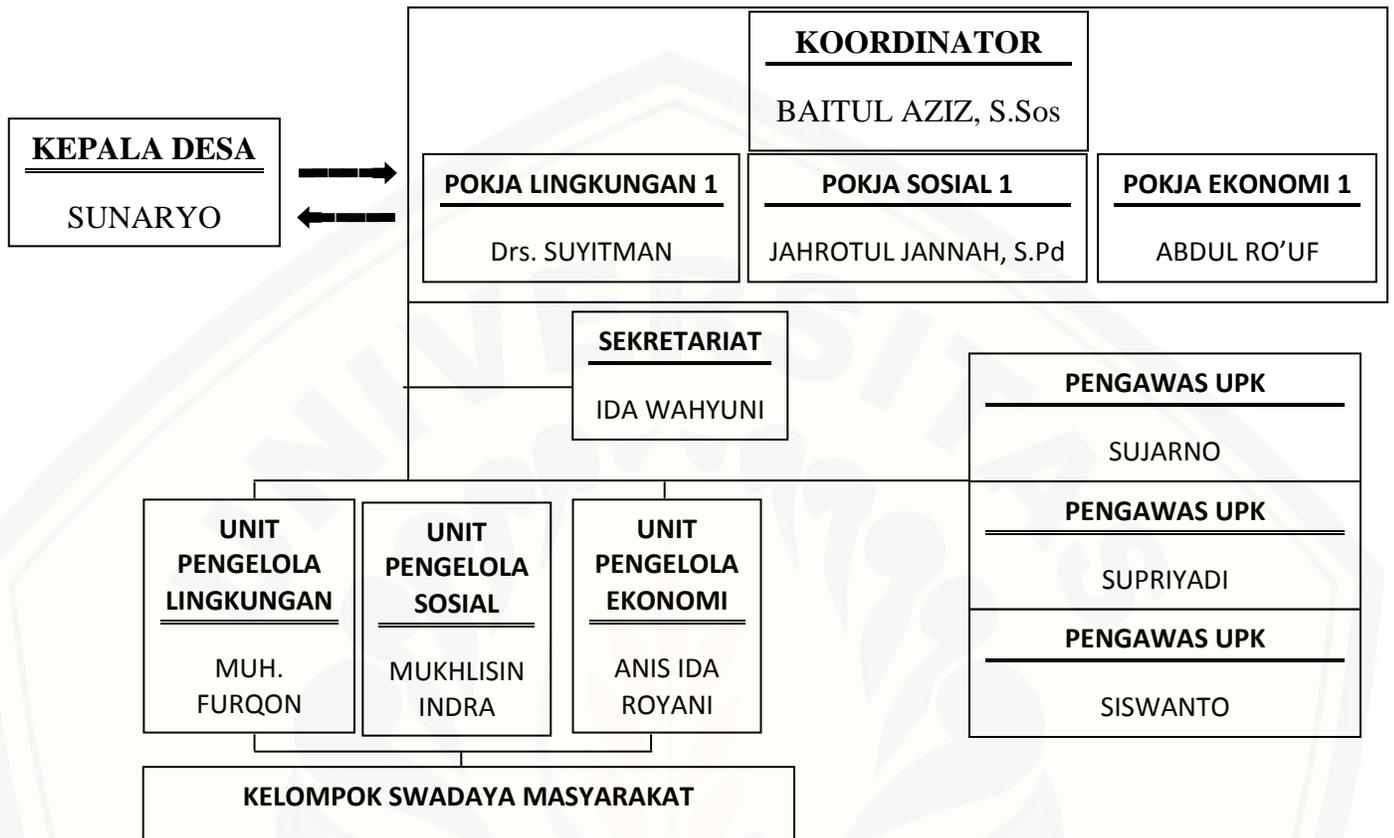
- a. kegiatan infrastruktur yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll);
- b. pembebasan lahan;
- c. pembangunan rumah ibadah;
- d. pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor BKM/ LKM;
- e. kegiatan infrastruktur dasar yang berdampak negative terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya local dan lain-lain yang dilarang dalam safeguard;
- f. pengadaan yang berbahaya
 - pengadaan produk apapun yang mengandung asbestos

- pengadaan pestisida atau herbisida;
- g. kegiatan destruktif
- pembangunan jalan menuju kawasan yang dilindungi (hutan lindung, cagar alam)
 - pembangunan sumber daya air pada sungai-sungai, yang masuk atau keluar dari Negara-negara lain
 - pengubahan aliran sungai;
- h. lain-lain
- reklamasi tanah yang lebih besar dari 50 hektar (ha)
 - konstruksi penampungan atau penyimpangan air dengan kapasitas lebih besar dari 10.000 m³.

4.3 Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Desa Karanganyar

Berdasarkan pada Petunjuk Pengembangan LKM, bahwa yang dimaksud LKM adalah suatu lembaga himpunan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Lembaga masyarakat tersebut memiliki peran utama sebagai dewan pengambilan keputusan yang dalam proses pengambilan keputusannya dilakukan secara partisipatif. Disamping sebagai sebagai dewan pengambilan keputusan, lembaga kemasyarakatan ini juga berperan menggalang potensi dan sumber daya, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang bersumber dari luar (channeling), dalam upaya menanggulangi berbagai persoalan pembangunan di wilayah desa/kelurahan. Lembaga ini juga merupakan jembatan penghubung aspirasi warga ke pemerintahan desa/kelurahan serta memperjuangkan kebutuhan warga di tingkat desa/kelurahan dalam musbangdes/kelurahan. Dengan kata lain, LKM merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya atau idenya kepada pemerintah desa, sebagai bahan masukan bagi pemerintah desa dalam membuat suatu kebijakan. (sumber:www.p2kp.org diakses pada 3 Maret 2014)

LKM Desa Karanganyar merupakan lembaga keswadayaan yang ada di Desa Karanganyar. Lembaga ini diketuai oleh Bapak Baitul Aziz, dan pada tahun ini merupakan periode keduanya sebagai ketua LKM Desa Karanganyar. Selain ketua, dalam lembaga tersebut terbagi dalam beberapa bagian, yaitu pokja lingkungan, pokja ekonomi, dan pokja sosial. (lihat lampiran struktur LKM Desa Karanganyar). Seperti yang disampaikan diatas, bahwa LKM berperan sebagai dewan pengambilan keputusan yang proses pengambilan keputusannya dilakukan secara partisipatif, atau berdasarkan musyawarah. Pada tahun 2013 lalu, Desa Karanganyar mendapatkan bantuan program dari pemerintah berupa bantuan langsung untuk pembangunan infrastruktur, yaitu P4IP. Melalui program tersebut, masyarakat dapat melakukan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu berupa jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Oleh karena itu, LKM Desa Karanganyar mengajak masyarakat untuk melakukan musyawarah penentuan program pembangunan infrastruktur bagi desa mereka. Berdasarkan daftar hadir musyawarah warga yang dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2013 (lihat lampiran), nampak bahwa masyarakat yang diundang, dapat hadir dalam kegiatan musyawarah warga. Hal ini merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat, yaitu dengan memberikan ide dan gagasannya terhadap program pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan di desa mereka. Selain itu, dalam musyawarah tersebut dibentuk lembaga KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), tujuannya untuk membantu LKM dalam melaksanakan tugas-tugasnya.



Gambar 4.1 Struktur Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Desa Karanganyar

Berdasarkan Petunjuk Pengembangan LKM, bahwa salah satu dari tugas pokok LKM adalah memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil BKM/LKM termasuk penggunaan dana-dana bantuan program pemberdayaan yang diterima. Seperti halnya pada saat desa menerima bantuan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP). Dana bantuan program tersebut dikelola oleh LKM desa, dengan mengajak masyarakat untuk memusyawarahkan penggunaan dana tersebut. Setelah selesai diputuskan, menginjak ke tahap pelaksanaan atau penggunaan dari dana tersebut. Dana yang digunakan dalam kegiatan tersebut, seperti pembelian material untuk pembangunan jalan paving, batu dan juga pasir, harus dilaporkan kepada bagian bendahara LKM. Dengan begitu, hal ini dapat memberikan jaminan dalam

penggunaan dana program pembangunan infrastruktur. Selain itu, menurut Bapak Baitul Aziz (Ketua LKM Desa Karanganyar) pada saat pembangunan jalan paving, tempat-tempat yang dijadikan sasaran pembangunan dipasang sebuah papan yang berisi tentang penggunaan anggaran didalam pembangunan tersebut, hal ini bertujuan agar masyarakat secara luas juga dapat melakukan monitoring terhadap penggunaan dana bantuan tersebut.

Peran LKM Desa Karanganyar dalam pelaksanaan P4IP, menurut Bapak Baitul Aziz (Ketua LKM Desa Karanganyar) adalah sebagai koordinator kegiatan program, menurut beliau kegiatan musyawarah warga juga difasilitasi oleh LKM. Pelaksanaan program ini diawali dengan menjadi fasilitator bagi warga untuk menyelenggarakan musyawarah warga yang bertempat di Balai Desa. Dalam hal ini, pihak LKM mengundang beberapa perwakilan warga penerima manfaat dan tokoh masyarakat (lihat lampiran). Berdasarkan data absensi yang ada diproposal kegiatan, terlihat bahwa warga yang diundang menghadiri kegiatan musyawarah tersebut. Kegiatan musyawarah warga ini dilaksanakan untuk membahas kegiatan dan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Berdasarkan musyawarah warga yang telah dilaksanakan, telah disepakati bahwa bantuan program yang diterima disalurkan untuk kegiatan pembangunan jalan paving. Pembangunan jalan paving dipilih oleh warga karena menurut Bapak Baitul Aziz, warga membutuhkan akses jalan yang memadai. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, peneliti masih mendapati di beberapa titik desa yang jalannya masih bertanah. Kondisi jalan yang demikian, dirasa oleh warga kurang nyaman untuk dilalui, terutama dimusim penghujan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa kondisi jalan yang bertanah akan becek dimusim penghujan. Kondisi jalan yang becek akan sulit dilalui oleh warga sehingga perlu adanya perbaikan terhadap jalan tersebut. Oleh karena itu, bantuan P4IP yang diterima warga sepenuhnya digunakan untuk pembangunan jalan paving agar dimusim penghujan, jalan tersebut masih nyaman untuk dilalui oleh warga. Selain melakukan perencanaan terhadap kegiatan

program, juga diputuskan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yaitu KSM Bilung dan KSM Togog.

Setelah diputuskan kegiatan pembangunannya, maka selanjutnya adalah merealisasikan dari apa yang telah dimusyawarahkan. Pada tahap pelaksanaan, pihak LKM mensosialisasikan kegiatan tersebut kepada masyarakat, tujuannya agar masyarakat turut serta dalam kegiatan pembangunan jalan paving. Hal itu diperlihatkan dari proposal kegiatan, bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan jalan paving tampak beragam. Mulai partisipasi dalam bentuk tenaga, keahlian dan beberapa warga yang berpartisipasi dalam bentuk bahan material (pasir, semen, paving) yang digunakan untuk pembangunan jalan paving. Menurut Bapak Baitul Aziz (Ketua LKM Desa Karanganyar) bahwa kegiatan pembangunan jalan paving terselenggara dengan baik, masyarakat secara gotong royong melaksanakan pembangunan jalan paving. Hal ini membuat pengerjaan pembangunan jalan paving menjadi lebih mudah, dan dapat diselesaikan secara efisien.

4.4 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Menurut Petunjuk Teknis Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) (yang diakses di www.p2kp.org), bahwa kelompok ini merupakan kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya suatu kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama. Kelompok tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang berdaya dan mampu memecahkan permasalahan secara mandiri. Kelompok tersebut diharapkan dapat memecahkan permasalahan secara mandiri, artinya mereka diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri rencana dan keputusan yang sesuai dengan permasalahannya. Tujuan itu dapat dicapai dengan

mencapai tujuan-tujuan yang disampaikan melalui Petunjuk Teknis Pengembangan KSM sebagai berikut:

- a. Tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memperkuat kembali ikatan-ikatan pemersatu sebagai media membangun solidaritas sosial melalui pembelajaran bertumpu pada kelompok;
- b. Masyarakat memahami tujuan KSM, nilai dan prinsip dasar yang diusung KSM, peran dan fungsi KSM, kriteria anggota KSM, dan aturan main KSM;
- c. Kelompok masyarakat yang bersepakat terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan menyusun tujuan, struktur, aturan main serta kegiatan KSM-nya;
- d. Membangun dan menerapkan nilai – nilai kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam kegiatan KSM sebagai dasar dalam pengembangan modal sosial;
- e. Berfungsinya aturan main tanggung renteng, keswadayaan modal, dll.

Tujuan-tujuan yang telah disampaikan sebelumnya akan dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, tumbuhnya dan kepedulian masyarakat untuk memperkuat kembali ikatan-ikatan pemersatu sebagai media membangun solidaritas sosial melalui pembelajaran bertumpu pada kelompok. Kesadaran dan kepedulian dari masyarakat merupakan hal yang dirasa tidak dapat dikesampingkan dalam ikatan sebuah kelompok, tanpa adanya kesadaran dan kepedulian tersebut dirasa akan sulit membentuk sebuah kelompok masyarakat yang solid. Kesadaran dalam kamus besar Bahasa Indonesia (diakses dari kbbi.web.id) diartikan sebagai suatu keadaan mengerti. Jadi keadaan saling mengerti antar satu individu dengan individu yang lainnya, sehingga apabila telah muncul rasa saling mengerti, maka dapat memunculkan rasa kepedulian antar individu. Hal ini dapat berdampak positif, sebagai contoh apabila salah satu individu dari masyarakat tersebut, memiliki

permasalahan, maka individu yang lain pun akan merasakan hal yang sama, sehingga mereka pun akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kedua, masyarakat memahami tujuan KSM, nilai dan prinsip dasar yang diusung KSM, peran dan fungsi KSM, kriteria anggota KSM, dan aturan main KSM. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat memahami tujuan KSM, maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk terlibat didalam kegiatan KSM, seperti dalam kegiatan musyawarah warga. Pemahaman tentang KSM bertujuan agar nantinya apa yang direncanakan oleh KSM sejalan dengan keinginan dari masyarakat, sehingga timbul komunikasi antara masyarakat dan KSM.

Ketiga, kelompok masyarakat yang bersepakat terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan menyusun tujuan, struktur, aturan main serta kegiatan KSM-nya. Setelah masyarakat memahami tentang KSM, dan hal itu diterima baik oleh masyarakat, maka selanjutnya adalah masyarakat tersebut akan mau terlibat didalam kegiatan KSM. Masyarakat dapat terlibat langsung dalam kegiatan perencanaan kegiatan maupun dalam pelaksanaan kegiatan itu sendiri.

Keempat, membangun dan menerapkan nilai-nilai kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam kegiatan KSM sebagai dasar dalam pengembangan modal sosial. Nilai kemasyarakatan merupakan suatu konsep yang berasal dari manusia mengenai apa yang dianggap baik dan tidak baik. Hal ini dapat dikatakan suatu kesepakatan yang berlaku didalam masyarakat itu sendiri. Tujuan dengan adanya penerapan nilai-nilai tersebut, adalah agar setiap kegiatan yang direncanakan oleh KSM sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku dimasyarakat. Hal ini agar setiap kegiatan KSM dapat diterima dan didukung dengan baik oleh masyarakat.

Kelima, berfungsinya aturan main tanggung renteng, keswadayaan modal, dll. Tanggung renteng merupakan istilah dimana segala sesuatu dilakukan secara bersama-sama. Biasanya hal ini berkaitan dengan kegiatan pendanaan. Jadi yang dimaksud tanggung renteng ini setiap kegiatan KSM tentunya membutuhkan pendanaan, oleh karena itu pendanaan tersebut dipikul secara bersama-sama oleh

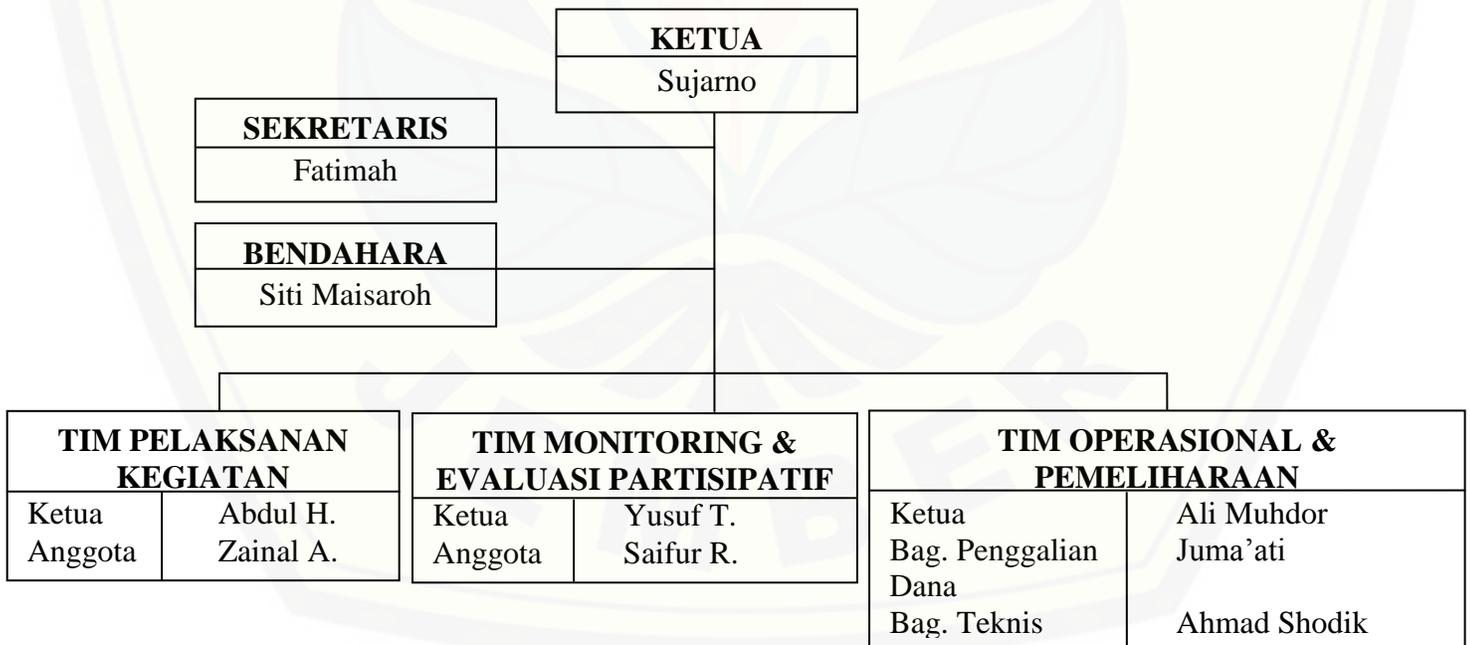
masyarakat. Selain sebagai bentuk kebersamaan, hal ini juga dapat memudahkan masyarakat dalam merealisasikan setiap kegiatan kemasyarakatan.

Secara konseptual, dalam berkelompok masyarakat bisa mengambil banyak manfaat darinya. Oleh karena itu, keberadaan KSM diharapkan bisa memenuhi kebutuhan materiil maupun psikologis warga masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, maka KSM diharapkan dapat berperan dan berfungsi seperti berikut ini:

- a. Sebagai sarana pendorong dalam proses perubahan sosial. Proses pembelajaran yang terjadi dalam KSM adalah menjadi pendorong terjadinya perubahan paradigma, pembiasaan praktek nilai-nilai baru, cara pandang dan cara kerja baru serta melembagakannya dalam praktek kehidupan sehari-hari.
- b. Sebagai wadah pembahasan dan penyelesaian masalah. Setiap kegiatan yang dilaksanakan KSM lazimnya berkaitan dengan upaya memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok, dan penyelesaiannya merupakan rumusan bersama yang disepakati secara bersama-sama pula.
- c. Sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi. Jika ada permasalahan, kepentingan, ataupun harapan yang berkembang di masyarakat, maka KSM dapat menampungnya, membahas dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang relevan, dengan tetap berpijak pada hak-hak warga masyarakat yang lainnya.
- d. Sebagai wadah untuk menggalang tumbuhnya saling kepercayaan (menggalang social trust). Melalui KSM, para anggota bisa saling terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan membagi tanggung jawab semata-mata atas dasar saling percaya. Saling percaya secara sosial ini dapat dibangun melalui cara penjaminan di antara para anggota kelompok yang telah bersepakat, serta melalui rekomendasi kelompok. Ketika kelompok membangun hubungan dengan pihak lainpun, kepercayaan tersebut sebagai modalnya yang utama.

- e. Sebagai wahana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika masyarakat membutuhkan dana atau modal, maka KSM bisa berfungsi sebagai sumber keuangan. Keuangan di KSM bisa saja bersumber dari pihak luar ataupun dari internal anggota sendiri, misalnya dengan cara iuran bersama. Iuran anggota tersebut bisa menjadi modal usaha dan sekaligus menjadi salah satu bentuk ikatan pemersatu dan membangun kekuatan secara mandiri.

Di desa Karanganyar, telah dibentuk dua kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yaitu KSM Bilung dan KSM Togog. Berdasarkan proposal kegiatan P4IP, KSM Bilung diketuai oleh Bapak Sujarno yang berasal dari Dusun Krajan, sedangkan KSM Togog diketuai oleh Bapak Siswanto yang berasal dari Dusun Sumberan. Peran KSM dalam kegiatan P4IP yang dilaksanakan di Desa Karanganyar adalah sebagai lembaga yang mengkoordinir warga masyarakat agar masyarakat mau berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bilung Desa Karanganyar

Telah disampaikan sebelumnya bahwa KSM yang telah dibentuk oleh Desa Karanganyar terdiri atas 2 buah, namun karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu memiliki tim pemeliharaan, maka peneliti mencantumkan salah satu struktur organisasi KSM Desa Karanganyar. Berdasarkan struktur organisasi diatas, telah ditentukan masyarakat yang bertugas di dalam tim pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun melalui P4IP. Jadi berdasarkan struktur diatas, terdapat seseorang yang bertugas dalam penggalan dana dan bagian teknis. Seseorang dalam penggalan dana, dengan menarik dana dari masyarakat, baik secara rutin maupun tidak. Begitu halnya dengan bagian teknis, disini bertugas dalam hal pelaksanaan pemeliharaan itu sendiri. Mulai dari pekerjaannya sampai dengan bahan material yang digunakan dalam pemeliharaan infrastruktur. Pihak KSM bekerja sama dengan masyarakat untuk mengontrol jalan paving yang telah dibangun, dengan melaporkan apabila terdapat kerusakan pada jalan paving. Laporan warga yang diterima selanjutnya ditampung oleh KSM dan segera melakukan perencanaan untuk diambil tindakan penyelesaian terhadap kerusakan pada jalan paving.

Namun dalam pelaksanaannya, tim pemeliharaan yang telah ditunjuk tidak bekerja secara fungsional. Menurut Bapak Sujarno (Ketua KSM Bilung Desa Karanganyar) bahwa, hal itu dikarenakan titik pengerjaan pembangunan jalan paving yang menjadi tanggung jawab tim pemeliharaan lebih banyak dibandingkan jumlah petugas yang berada dalam tim pemeliharaan, sehingga dinilai kurang efisien. Selain itu pula, muncul adanya ketidakpercayaan masyarakat apabila dilakukan penarikan dana untuk pemeliharaan jalan paving.

KSM mengajak masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pembangunan jalan paving adalah dengan melakukan musyawarah dengan warga. Musyawarah ini dilakukan supaya warga mengetahui apa yang direncanakan oleh KSM, sehingga apabila masyarakat sudah mengetahui rencana pembangunan jalan paving, maka masyarakat pun secara tidak langsung akan mau terlibat didalam kegiatan tersebut. Hal itu dikarenakan pembangunan jalan paving yang akan dilaksanakan nantinya juga

akan dimanfaatkan oleh masyarakat desa sendiri. Menurut Bapak Sujarno (Ketua KSM Bilung), bahwa kegiatan pembangunan jalan paving dilaksanakan secara gotong royong, dan semua warga pun terlibat didalam kegiatan pembangunan jalan paving tersebut. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Sujarno, bahwa kegiatan sosialisasi kepada warga mengenai adanya pembangunan jalan paving di lingkungan desa dapat dikatakan berhasil. Warga yang terlibat pun tampak antusias dengan mengerahkan segala kemampuan yang mereka miliki demi pembangunan jalan paving.

Kemampuan yang dikerahkan oleh warga pun tampak beragam. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Siswanto (Ketua KSM Togog), bahwa dalam pelaksanaan pembangunan jalan paving semua warga terlibat dalam kegiatan tersebut, dan mereka saling bekerja sama dengan memberikan kemampuannya didalam pembangunan tersebut. Masyarakat yang berada di lingkungan tersebut sebagian berprofesi sebagai tukang bangunan, sehingga hal ini memberikan keuntungan dalam pembangunan itu sendiri. Pihak KSM pun tidak perlu bingung mencari tenaga ahli dibidang pembangunan jalan paving tersebut. Selain partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, adapula warga yang berpartisipasi dalam bentuk uang, bahan material (pasir, semen, batu), sehingga pembangunan jalan paving tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

4.5 Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Jalan Paving

Menurut Undang-undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan (sumber:bpjt.pu.go.id diakses) bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan merupakan sarana penghubung antara tempat satu dan tempat yang lainnya. Masyarakat dapat menggunakan sarana tersebut untuk mencapai tempat yang mereka inginkan, seperti sekolah, pasar dan tempat yang lainnya. Selain itu pula, bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang atau pelaku ekonomi yang lain, dengan adanya jalan tersebut, dapat memperlancar kegiatan perekonomian mereka, sehingga roda perekonomian di tempat tersebut dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan jalan yang memadai agar kegiatan masyarakat menjadi tidak terhambat. Salah satu upaya untuk menjaga jalan agar tidak rusak adalah dengan melakukan pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan suatu upaya untuk menjaga kualitas dari suatu barang.

Pemeliharaan terdiri atas dua macam, yaitu: pemeliharaan terencana dan pemeliharaan tak terencana. Seperti yang ditulis oleh Corder (1996) bahwa "...pencegahan lebih baik daripada pengobatan". Hal itu berarti pemeliharaan yang bersifat pencegahan lebih baik daripada pemeliharaan yang bersifat darurat. Corder menambahkan bahwa pemeliharaan terencana dapat mencegah terjadinya reparasi pemeliharaan darurat yang mahal. Dengan kata lain, pemeliharaan secara terencana dapat meringankan beban pembiayaan yang dikeluarkan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan tersebut. seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karanganyar dalam memelihara jalan paving yang telah dibangun oleh mereka. Masyarakat Desa Karanganyar telah membentuk tim yang bertugas dalam pemeliharaan jalan paving tersebut.

Dengan dibentuknya tim pemeliharaan jalan paving tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pemeliharaan yang diterapkan merupakan pemeliharaan yang bersifat terencana. Tim pemeliharaan ini beranggotakan masyarakat Desa Karanganyar.

Berdasarkan tabel tersebut, memang telah dibentuk tim yang bertugas dalam pemeliharaan jalan paving, tetapi pembentukan panitia tersebut menurut ketua LKM Bapak Baitul Aziz hanya bersifat formalitas untuk memenuhi persyaratan yang bersifat prosedural. Seperti yang diutarakan oleh beliau bahwa.

“orang-orang yang masuk dalam kepanitian itu, hanya ketua yang lebih banyak tahu mas, karena penitia itu dibentuk hanya untuk formalitas saja. Pemeliharaan itu diserahkan kepada masyarakat. tapi kalau jenengan ingin wawancara, langsung ke ketuanya saja, karena ketuanya yang lebih tahu.”

Bapak Baitul Aziz juga menambahkan bahwa.

“selama ini yang namanya penggalan dana untuk pemeliharaan jalan itu tidak ada.”

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Baitul Aziz, peneliti pun berusaha menemui ketua KSM yang disampaikan oleh beliau. Keesokan harinya, peneliti berniat menemui ketua dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ada di Desa Karanganyar. Kelompok tersebut terdiri atas 2 (dua) kelompok, yaitu; KSM Bilung dan KSM Togog. Peneliti pun menemui kedua ketua kelompok tersebut, yaitu; Bapak Sujarno selaku Ketua KSM Bilung dan Bapak Siswanto selaku Ketua KSM Togog. Peneliti merasa beruntung karena dapat menemui mereka dalam satu tempat, karena pada saat yang bersamaan mereka sedang memperbaiki kios-kios yang ada di Pasar Karanganyar, dan peneliti segera melakukan wawancara agar tidak mengganggu pekerjaan mereka.

Peneliti memperoleh informasi bahwa untuk pemeliharaan jalan paving yang dibangun melalui P4IP merupakan tanggung jawab dari masyarakat. Hal itu telah menjadi tanggung jawab masyarakat yang berada di sekitar pembangunan jalan paving itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sujarno ketua KSM Bilung bahwa.

“untuk pemeliharaannya, yang bertanggung jawab adalah masyarakat mas, Jadi terserah masyarakat caranya bagaimana, itu terserah mereka”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Siswanto selaku ketua KSM Togog, bahwa untuk pemeliharaan jalan paving itu diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar jalan paving itu menjadi penanggung jawab terhadap keberlangsungan jalan paving itu. Informasi yang didapatkan oleh

peneliti, selanjutnya peneliti melakukan verifikasi terhadap pernyataan yang telah disampaikan oleh kedua ketua KSM tersebut.

Tempat yang dijadikan sasaran pembangunan jalan paving tersebar di ketiga dusun yang ada di Desa Karanganyar, yaitu: Dusun Sentong (2 lokasi). Dusun Krajan (7 lokasi) dan Dusun Sumberan (9 lokasi). Jadi, peneliti mengambil sampel dimasing-masing dusun tersebut.

Pertama, peneliti menemui seorang informan yang tinggal di Dusun Sentong, Desa Karanganyar, yang bernama Bapak Miftahul Ulum. Dalam percakapan peneliti dengan informan, informan menyampaikan kesenangannya terhadap jalan yang berada disamping rumahnya telah dipaving. Beliau menyampaikan demikian.

“ketika jalan ini sudah dipaving, enak mas, biasanya setiap hujan jalan ini selalu becek, jadi tidak bisa dilewati. Terus untuk pemeliharannya, jadi kayak ada kendaraan berat itu tidak boleh lewat jalan ini. terus kalau ada yang rusak, jadi siapa yang melihat duluan, ya itu yang melapor ke pak RT, nanti kita perbaiki bareng-bareng”.

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap Bapak Miftahul Ulum, bahwa partisipasi masyarakat yang disampaikan oleh beliau merupakan partisipasi pemeliharaan dalam bentuk pencegahan. Jadi fokus pada penjagaan terhadap jalan tersebut dari kendaraan-kendaraan yang melebihi tonase.

Kedua, peneliti menemui Ibu Susiyati. Beliau merupakan warga Dusun Sentong yang tinggal di RT 05/ RW 20. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Susiyati mengenai kesenangannya karena jalan yang berada di depan rumahnya telah nyaman untuk digunakan. Beliau menyatakan demikian.

”saya senang mas, karena jalannya sudah tidak becek, dan kalau ada kendaraan, seperti mobil mau lewat, jadi kalau ada yang rusak mereka diminta untuk memperbaiki jalan ini, biasanya Pak RT yang meperbaiki jalan ini kalau ada yang rusak”.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Susiyati, peran dari ketua RT yang ada di RT tersebut cukup aktif. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Ibu

Susiyati, bahwa apabila terdapat jalan paving yang rusak maka ketua RT tersebut yang berinisiatif untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Pernyataan yang disampaikan oleh kedua warga Dusun Sentong dapat mengindikasikan bahwa masyarakat dari dusun tersebut sadar dengan tanggung jawabnya dalam menjaga jalan yang telah dibangun tersebut.

Ketiga, peneliti mencoba untuk menemui warga yang bertempat tinggal di Dusun Krajan. Peneliti menemui seorang warga Dusun Krajan yang bernama Bapak Abdurrahman yang tinggal di RT 01 RW 15. Serupa dengan apa yang telah disampaikan oleh dua informan sebelumnya, Bapak Abdurrahman pun menyatakan kalau kondisi saat ini telah membuat perbedaan bagi warga yang bertempat tinggal di dusun yang menjadi sasaran pembangunan jalan paving tersebut. Beliau menyampaikan demikian.

“dengan adanya paving ini, jalan lebih enak, karena dulu sebelum jalan dipaving sering banjir, dan saling menjaga, kalau terjadi kerusakan maka akan diajukan ke desa”

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Abdurrahman, bahwa dengan dibangunnya jalan paving yang berada tepat di depan rumahnya. Banjir yang sering kali terjadi di depan tempat tinggalnya ketika hujan tiba, setelah jalan tersebut dipaving banjir tersebut sudah tidak terjadi kembali. Hal ini merupakan dampak yang positif dengan adanya pembangunan jalan paving ini. Selain dapat terlihat rapi, ternyata pembangunan jalan paving yang baik, dapat mengatasi banjir ketika hujan turun. Menurut beliau apabila pemeliharaan yang diterapkan oleh masyarakat sekitar jalan tersebut, warga saling menjaga apabila terdapat kendaraan berat yang ingin melewati jalan tersebut.

Keempat, peneliti pun berusaha mencari informasi kepada warga Dusun Krajan yang lain dan peneliti menemui Bapak Suroto yang tinggal di RT 02 RW 11. Bapak Suroto juga menyampaikan kesenangannya terhadap jalan yang telah rapi, sudah tidak terlihat becek ketika hujan. Pembangunan jalan paving yang dilakukan di Desa Karanganyar ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satu

dampak positifnya adalah jalan terlihat rapi dan tidak terlihat becek ketika hujan turun. Bapak Suroto menyampaikan demikian.

“seneng, dalane resik, lek udan2 perkoro lewat iku gak becek, terus kalau ada paving yang rusak, masyarakat berinisiatif sendiri untuk memperbaiki, terus kendaraan yang lewat jalan ini, kendaraan yang berat itu gak boleh lewat”.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Bapak suroto, bahwa dengan adanya pembangunan jalan paving yang berada di dusun tersebut memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Teknik pemeliharaan yang diterapkan oleh masyarakat disana sama seperti apa yang telah disampaikan oleh informan sebelumnya, yaitu saling menjaga jalan tersebut dari kendaraan-kendaraan berat yang ingin melewati jalan tersebut. Kendaraan-kendaraan berat tersebut dialihkan ke jalan yang lain agar tidak merusak jalan paving tersebut.

Kelima, selanjutnya peneliti menemui informan yang berada di Dusun Sumberan. Dalam hal ini peneliti menemui seseorang yang bernama Bapak Satimo yang bertempat tinggal di RT 04/ RW 04. Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Satimo yang tinggal di Dusun Sumberan, walaupun jalan paving yang berada di dekat rumahnya hanya cukup untuk kendaraan kecil, seperti sepeda motor atau becak. Beliau menyampaikan kesenangannya dengan adanya pembangunan jalan paving tersebut. seperti yang disampaikan berikut ini.

“Baik, senang dengan adanya paving ini, apabila ada jalan yang rusak, itu inisiatif dari masyarakat untuk memperbaiki, gotong royong.”

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Satimo bahwa dengan adanya jalan paving ini, terlihat lebih rapi dan nyaman untuk dilewati, sementara untuk pemeliharaan jalan tersebut merupakan tanggung jawab bersama warga yang berada di sekitar jalan. Cara pemeliharannya pun sama seperti yang diterapkan di dusun yang lain, yaitu dengan rembuk bersama warga apabila terjadi kerusakan terhadap jalan tersebut.

Sementara itu, pada saat peneliti melakukan observasi, peneliti menemukan salah satu jalan paving yang mengalami kerusakan, yaitu di Dusun Krajan RT 1/RW 13. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa kerusakan pada jalan paving tersebut berupa jalan paving yang retak sepanjang 5 m dan ambles sepanjang 7 m dari total jalan sepanjang 30 m. Menurut salah satu warga, yaitu Bu Lilis yang tinggal tepat didepan jalan paving yang rusak, kerusakan itu sudah terjadi sejak lama, namun berdasarkan observasi kami, kerusakan jalan tersebut masih dibiarkan begitu saja. Peneliti mencoba menanyakan penyebab kerusakan jalan paving tersebut, dan menurut Bu Lilis bahwa,

“kerusakan jalan ini sudah lama terjadi, dan penyebabnya karena tanahnya labil mas. Dulunya tanah disekitar ini sering diambil untuk usaha pembuatan genting.”

Menurut ketua RT 1/RW 13 yaitu Bapak Sabilan, bahwa ketika pembangunan jalan paving, kondisi tanah yang labil tersebut telah diurug sebelum dipasang paving, sehingga kondisi jalan tampak rata. Beliau juga menambahkan bahwa kerusakan jalan paving ini disebabkan karena seringnya diguyur hujan ketika musim penghujan awal tahun 2014 lalu.

Permasalahan adalah berdasarkan keterangan dari warga bahwa kerusakan itu sudah ada sejak lama, namun kerusakan tersebut masih dibiarkan begitu saja. Peneliti pun mencoba mencari tahu mengenai mengapa kerusakan jalan paving tersebut masih dibiarkan. Berdasarkan juklak pelaksanaan kegiatan program, bahwa kegiatan P4IP dilakukan dengan pendekatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang berkaitan dengan program tersebut, harus ada keikutsertaan dari masyarakat. sebelumnya telah disampaikan, bahwa lingkup dari partisipasi masyarakat adalah partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan. Namun, selain keempat lingkup partisipasi tersebut, yang juga dinilai penting adalah partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek pembangunan yang telah diselesaikan. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2012:83), bahwa dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat sering melupakan tanggung jawabnya dalam pemeliharaan

proyek-proyek pembangunan yang berhasil diselesaikan. Kondisi ini pun rupanya telah terjadi di Desa Karanganyar, berdasarkan observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti, terdapat kondisi jalan paving yang sudah dibangun melalui P4IP mengalami kerusakan, dan kondisi itu masih tetap ada hingga saat ini. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa masyarakat melupakan tanggung jawabnya untuk memelihara jalan paving tersebut.

Berdasarkan analisis peneliti, bahwa penyebab kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara jalan paving tersebut adalah karena kurangnya sosialisasi kepada warga mengenai pemeliharaan jalan paving. Hal itu dibuktikan dengan keterangan yang disampaikan oleh Bu Lilis. Ketika peneliti menanyakan mengapa kerusakan ini tetap dibiarkan begitu saja, menurut Bu Lilis bahwa beliau menyampaikan,

“saya sebenarnya merasa tidak nyaman dengan rusaknya jalan ini, tapi bagaimana, kalau saya sendiri saja sedangkan yang lain.”

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bu Lilis tersebut, bahwa sebenarnya beliau memiliki keinginan untuk memperbaiki jalan tersebut, namun beliau menganggap masyarakat yang lain hanya diam diri, sehingga beliau mempertimbangkan kembali untuk memperbaiki jalan paving tersebut. Selain itu warga lainnya yaitu Bapak Sukron juga menyatakan hal yang sama mengenai jalan paving yang rusak tersebut. Menurut beliau,

“kondisi jalannya sudah lama mas, saya tidak tahu kenapa kok gak diperbaiki.”

Seperti halnya yang disampaikan oleh Bu Lilis, Bapak Sukron pun menyampaikan bahwa kerusakan yang terjadi pada jalan paving tersebut telah berlangsung lama. Menurut pandangan peneliti dengan mendengar jawaban yang disampaikan oleh Bapak Sukron, bahwa ada ketidaktahuan dari beliau, kalau untuk pemeliharaan jalan paving tersebut merupakan tanggung jawab warga sekitar.

Oleh karena itu, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kedua informan tersebut, peneliti menganalisis bahwa tidak semua masyarakat mengetahui tanggung jawab pemeliharaan terhadap jalan paving tersebut. Berdasarkan juklak P4IP bahwa yang bertanggung jawab untuk memelihara hasil pembangunan yang telah diselesaikan melalui program tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Jadi apabila terjadi kerusakan pada jalan paving tersebut, yang seharusnya bertanggung jawab adalah masyarakat. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Baitul Aziz (Ketua LKM), bahwa setiap Ketua RT yang mendapatkan bantuan telah mendapatkan sosialisasi mengenai pemeliharaan jalan paving tersebut. Peneliti pun memverifikasi keterangan tersebut kepada Ketua RT 1/RW 13 yaitu Bapak Sabilan. Menurut Bapak Sabilan, bahwa untuk pemeliharaan jalan paving ini diserahkan kepada masyarakat, jadi apabila kerusakan jalan paving itu terjadi di depan rumahnya, maka masyarakat yang berada di sekitar jalan tersebut yang bertanggung jawab untuk memperbaiki jalan paving itu.

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang sudah dibentuk, memiliki tim yang bertugas untuk memelihara jalan paving yang dibangun melalui P4IP. Namun dalam kenyataannya, tim ini tidak difungsikan secara maksimal. Hal itu dibuktikan dengan keterangan yang disampaikan oleh bapak Baitul Aziz, yang menyatakan bahwa selama ini tidak ada penarikan dana untuk pemeliharaan. Hal itu dikarenakan lokasi pengerjaan yang banyak sehingga dinilai kurang efisien. Oleh karena itu, pihak LKM mengajak ketua RT yang lokasinya terdapat titik pengerjaan jalan paving untuk diberikan pengarahan mengenai pemeliharaan jalan paving. Jadi berdasarkan hasil pengarahan tersebut, masyarakat diminta bersama-sama mengontrol jalan paving, salah satu upaya yang telah dan masih diterapkan adalah dengan membatasi kendaraan yang melewati jalan tersebut. Kendaraan berat seperti mobil dan truk dialihkan ke jalan yang permukaan jalannya makadam. Hal ini sebagai salah satu bentuk pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat demi menjaga kualitas jalan paving itu sendiri. Selain itu apabila jalan paving mengalami kerusakan yang sedikit, maka warga diminta bersama-sama untuk berinisiatif dengan mengumpulkan

dana secara swadaya untuk memperbaiki jalan paving. Permasalahan yang terjadi di RT 1 RW 13 Dusun Krajan, masyarakat memiliki keinginan untuk memperbaiki jalan paving yang rusak di lingkungannya. Namun, karena kurangnya dukungan dari warga yang lain membuat keinginan beberapa warga tersebut belum terealisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari ketua RT setempat agar keinginan dari beberapa warga untuk memperbaiki jalan paving yang rusak dapat didukung oleh warga yang lain. Dukungan ini dibutuhkan agar dalam kegiatan perbaikan jalan paving tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga jalan paving yang telah dibangun dapat segera dimanfaatkan secara optimal seperti pertama dibuat. Dalam hal ini, ketua RT setempat perlu mengajak warga dengan melakukan musyawarah untuk merencanakan kegiatan perbaikan terhadap jalan paving yang mengalami kerusakan. Mulai dari penentuan anggaran sampai sumber daya manusia yang ditunjuk untuk kegiatan perbaikan jalan paving. Hal ini berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama, bahwa masyarakat bertanggung jawab untuk memelihara jalan paving yang telah dibangun melalui P4IP. Jadi apabila dikaitkan dengan tangga partisipasi Arnstein, kegiatan partisipasi masyarakat yang telah diberlakukan oleh masyarakat Desa Karanganyar telah sampai pada tahapan dimana masyarakat diberikan kewenangan untuk memelihara jalan paving, yaitu pada tangga pendelegasian kekuasaan. Dalam hal ini, pemerintah telah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun bersama-sama oleh masyarakat.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jalan paving di Desa Karanganyar, bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jalan ini berupa pemeliharaan yang bersifat pencegahan. Secara umum partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jalan ini, yaitu dengan saling menjaga jalan tersebut dengan membatasi kendaraan yang melintasi jalan ini. Kendaraan berat yang ingin melewati jalan tersebut, dialihkan oleh warga desa ke jalan yang lain. Hal itu dilakukan karena peruntukan jalan paving tersebut, hanya untuk kendaraan-kendaraan yang ringan, seperti sepeda motor. Kerusakan jalan paving yang terjadi di RT 1/RW 13 membuktikan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui tentang tanggung jawab pemeliharaan jalan paving yang sudah dibangun melalui P4IP tersebut. Apabila dilihat melalui tangga partisipasi Arnstein, partisipasi masyarakat desa Karanganyar dalam pemeliharaan jalan paving telah sampai pada tingkatan yang tertinggi, yaitu pada pengendalian masyarakat. Hal itu terlihat dari masyarakat yang aktif dengan melakukan pemeliharaan secara preventif, dengan membatasi kendaraan yang melintasi jalan paving tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat saran dari peneliti terhadap partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jalan tersebut. Upaya yang telah disepakati oleh warga untuk pemeliharaan jalan, sebaiknya dipertahankan dan juga perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan seiring berjalannya waktu, jalan tersebut akan

mengalami kerusakan, bahkan sampai kerusakan yang berat. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan pemeliharaan yang baik, agar ketika terdapat kerusakan, maka akan cepat diambil tindakan penyelesaian terhadap kerusakan jalan paving.

Selain itu, diperlukan penggerak kegiatan untuk melakukan pemeliharaan jalan paving oleh aparat di lingkungan desa, terutama Ketua RT/RW. Selain itu juga dapat mengajak tokoh masyarakat disana untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jalan paving yang telah dibangun melalui P4IP. Setiap individu dalam lingkungan masyarakat, tentu memiliki persepsi sendiri, oleh karena itu diperlukan adanya pertemuan warga supaya dapat menyatukan persepsi mereka mengenai pemeliharaan jalan paving. Dalam pertemuan warga tersebut, juga diperlukan perencanaan yang matang untuk melakukan kegiatan pemeliharaan jalan paving. Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada kebingungan dari masyarakat mengenai pemeliharaan jalan paving.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Corder, Antony. *Teknik Manajemen Pemeliharaan*. Alih bahasa oleh Kusnul Hadi. 1996. Jakarta: Erlangga
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI- Press).
- Moleong, Lexy. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta: Bumi aksara.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Peraturan

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 314/ KPTS/ M/ 2013 tentang Penetapan Desa/ Kelurahan Sasaran Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) Tahun 2013.
- UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 tahun 2006 tentang Jalan

Internet

administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id (diakses 18 September 2014)

bpjt.PU.go.id (diakses 28 September 2014)

Digilib.itb.ac.id/files/disk1/673/jbptitbpp-gdl-krishnaadh-33638-3-2009ta-2.pdf
(diakses 25 Oktober 2014)

Harianjayapos.com (diakses 20 Oktober 2014)

Kbbi.web.id (diakses 19 September 2014)

Lib.ui.ac.id/file?file=digital/125998-6699-Pengaru%20infrastruktur-Literatur.pdf
(diakses 22 Oktober 2014)

P2kp.org (diakses 3 Maret 2014)

Tv.Okezone.com (diakses 19 September 2014)

<http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/130295-T+27161-Partisipasi+masyarakat-Literatur.pdf> (diakses 6 April 2015)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nomor : 1096/UN25.3.1/LT.5/2014
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan
Penelitian

23 Juni 2014

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Jember
di -

LAMPIRAN 1

JEMBER

Memperhatikan surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 2418/UN25.1.2/LT/2014 tanggal 16 Juni 2014, perihal permohonan ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Rino Erwan M/090910201110
Fakultas / Jurusan : FISIP/Ilmu Administrasi Negara
Alamat / HP : Jl. Ikan Paus II/Hp. 085230980828
Judul Penelitian : Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Proyek Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (P4IP) di Desa Karang Anyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember
2. Desa Karang Anyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
Lama Penelitian : Dua bulan (23 Juni 2014 – 23 Agustus 2014)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

a.n Ketua
Sekretaris,



Dr. Zainuri, M.Si
NIP 196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan FISIP
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Letjen S. Parman No. 89 Telp. 337853 Jember



Kepada
Yth. Sdr. : 1. Kepala DPU Cipta Karya Kab. Jember
2. Camat Ambulu
Di -
J E M B E R

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/1354/314/2014

LAMPIRAN 2

Tentang

IJIN PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 15 tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
2. Peraturan Bupati Jember Nomor 62 tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat dari Lembaga Penelitian Universitas Jember Tanggal 23 Juni 2014 Nomor : 1096/UN25.3.1/LT.5/2014 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / No. Induk : Rino Erwan M. 090910201110
- Instansi / Fak : Ilmu Administrasi Negara / FISIP / Universitas Jember.
- Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember
- Keperluan : Melaksanakan Penelitian tentang : " Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Proyek Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (P4IP) di Desa Karang Anyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember ".
- Lokasi : DPU Cipta Karya Kab. Jember dan Desa Karang Anyar Kecamatan Ambulu.
- Tanggal : 24-06-2014 s/d 24-08-2014

Apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Penelitian ini benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 24-06-2014

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Sekretaris



Drs. MOH. HASYIM, M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 196902131982111001

- Tembusan :
- Yth. Sdr. : 1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU
DESA KARANGANYAR
JL. RAYA KOPRAL SOETOMO 237 Telp. 0336884829

SURAT KETERANGAN

LAMPIRAN 3

Nomor : 24 /350912.2005/VIII/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : RINO ERWAN M
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Jember.
Tempat tinggal / No. Tlp. Hp : Jl. Kalimantan No. 37 Jember.

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan tugas penelitian tentang “ Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Proyek Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (P4IP) di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember pada tanggal 24-06-2014 sampai dengan tanggal 24-08-2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Karanganyar, 27-08-2014

Kepala Desa



SUNARYO





**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 314 /KPTS/M/2013

TENTANG

**PENETAPAN DESA/KELURAHAN SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4IP)
TAHUN ANGGARAN 2013**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur permukiman, dilaksanakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan menyelenggarakan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) baik di perdesaan maupun di perkotaan;
- b. Program P4IP di perdesaan berupa kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) dan di perkotaan melalui kegiatan mendukung Program PNPM Mandiri perkotaan (P2KP);
- c. bahwa sesuai usulan dari Pemerintah Daerah dan masukan dari DPR-RI maka perlu ditetapkan alokasi dan nama-nama desa/kelurahan sasaran P4IP Tahun Anggaran 2013;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penetapan Desa/Kelurahan Sasaran Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) Tahun Anggaran 2013;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48441);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun 2013
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN DESA/KELURAHAN SASARAN PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4IP) TAHUN ANGGARAN 2013

- KESATU:** Menetapkan daftar desa/kelurahan penerima program yang kemudian disebut sebagai Desa/Kelurahan Sasaran Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- KEDUA:** Setiap desa/kelurahan sasaran akan menerima dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp 250 juta (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk dana pembangunan infrastruktur desa/kelurahan sasaran;
- KETIGA:** Dana Bantuan Langsung Masyarakat yang dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa/kelurahan sasaran ini berasal dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2013 yang dihibahkan kepada masyarakat desa/kelurahan sasaran;
- KEEMPAT:** Desa sasaran P4IP Perdesaan berjumlah 9.870 (sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh) desa yang tersebar di 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) kabupaten di 32 (tiga puluh dua) provinsi (Lampiran I); dan kelurahan sasaran P4IP Perkotaan berjumlah 1.800 (seribu delapan ratus) kelurahan yang tersebar di 218 (dua ratus delapan belas) kabupaten/kota di 33 (tiga puluh tiga) provinsi (Lampiran II);
- KELIMA:** Dalam hal ditemukan penyalahgunaan dana P4IP berdasarkan Hasil Pemeriksaan/Audit Tim Pemeriksa, masyarakat desa/kelurahan harus menyelesaikan temuan secara tuntas dan mengoptimalkan manfaat BLM bagi masyarakat.
- KEENAM:** Dalam pelaksanaan P4IP Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Daerah menunjuk Tim Koordinasi, Tim Pelaksana dan Satuan Kerja pada tingkat provinsi dan kabupaten.
- KETUJUH:** Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi, Tim Pelaksana dan Satuan Kerja tingkat provinsi dan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan program sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan yang ditetapkan;

KEDELAPAN: Nama-nama desa/kelurahan sasaran tidak dapat dilakukan perubahan kecuali:

- 1) Terdapat kesalahan pengetikan nama kecamatan atau nama desa/kelurahan sasaran;
- 2) Terdapat perubahan data administrasi yang diakibatkan oleh pemekaran desa/kelurahan atau pemekaran kecamatan atau pemekaran kabupaten;
- 3) Kebijakan khusus Tim Pelaksana Tingkat Pusat.

Perubahan tersebut diajukan oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota) kepada Direktur Jenderal Cipta Karya dengan melampirkan data pendukung.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

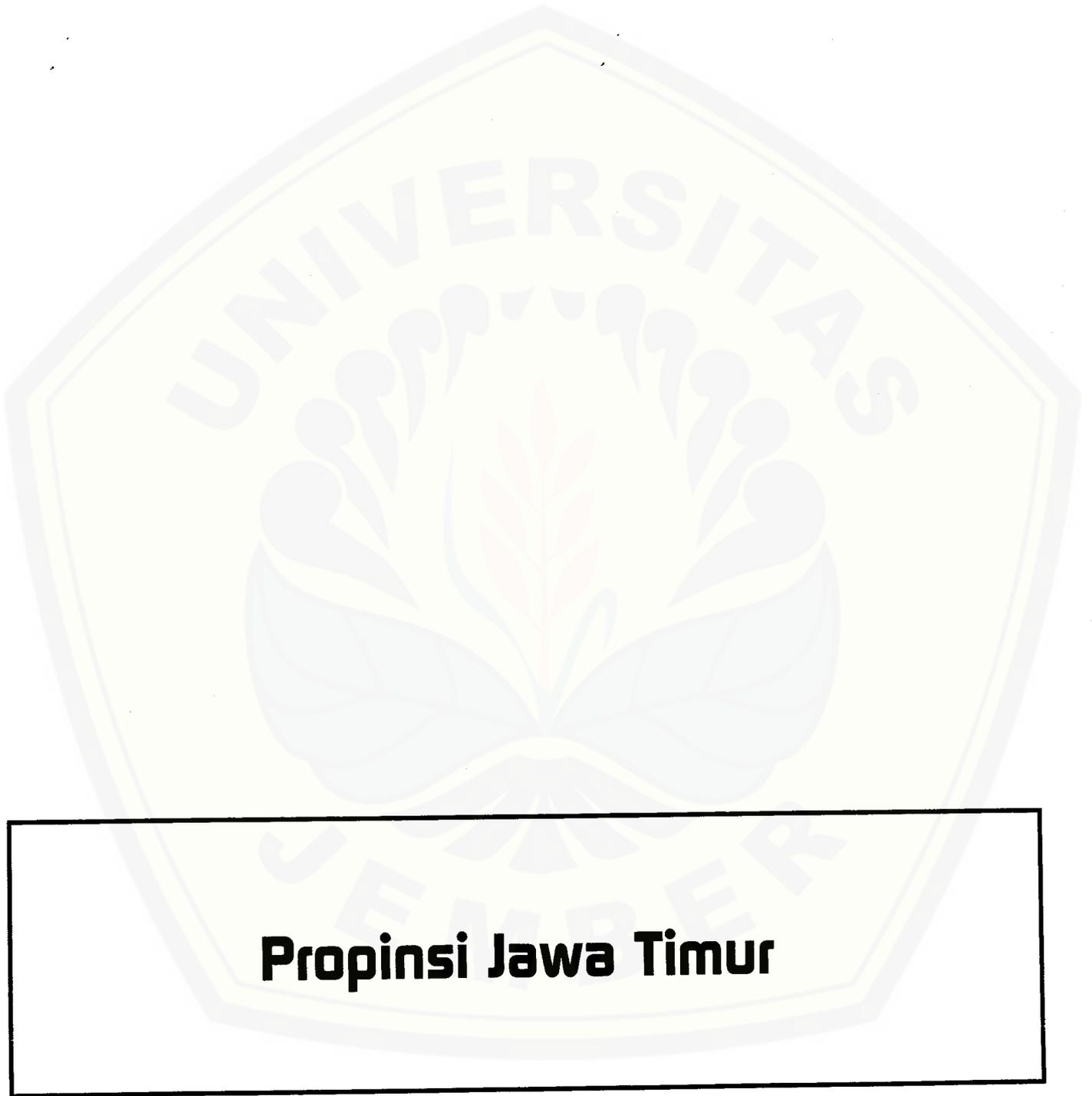
1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
7. Gubernur/Bupati di seluruh Indonesia;
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
11. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juli 2013

MENTERI PEKERJAAN UMUM, 


DJOKO KIRMANTO 

LAMPIRAN 5



Propinsi Jawa Timur

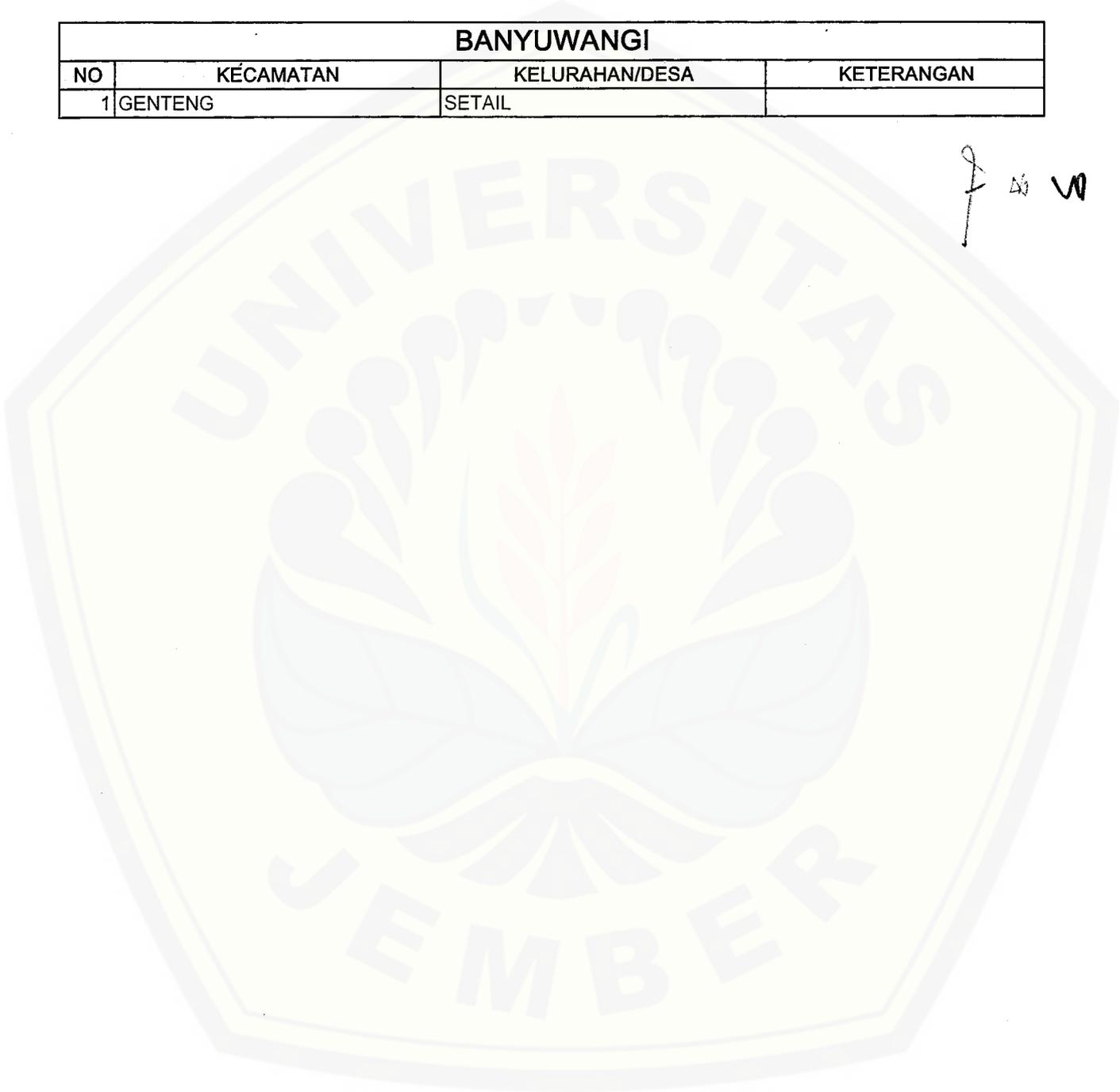


DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAFTAR KELURAHAN/DESA SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP) APBN-P TA. 2013
PROVINSI JAWA TIMUR

BANYUWANGI			
NO	KÉCAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	GENTENG	SETAIL	

f ds w





DAFTAR KELURAHAN/DESA SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP) APBN-P TA. 2013
PROVINSI JAWA TIMUR

BLITAR			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	WLINGI	BABADAN	
2	WLINGI	BERU	
3	WLINGI	KLEMUNAN	
4	WLINGI	TANGKIL	
5	WLINGI	WLINGI	

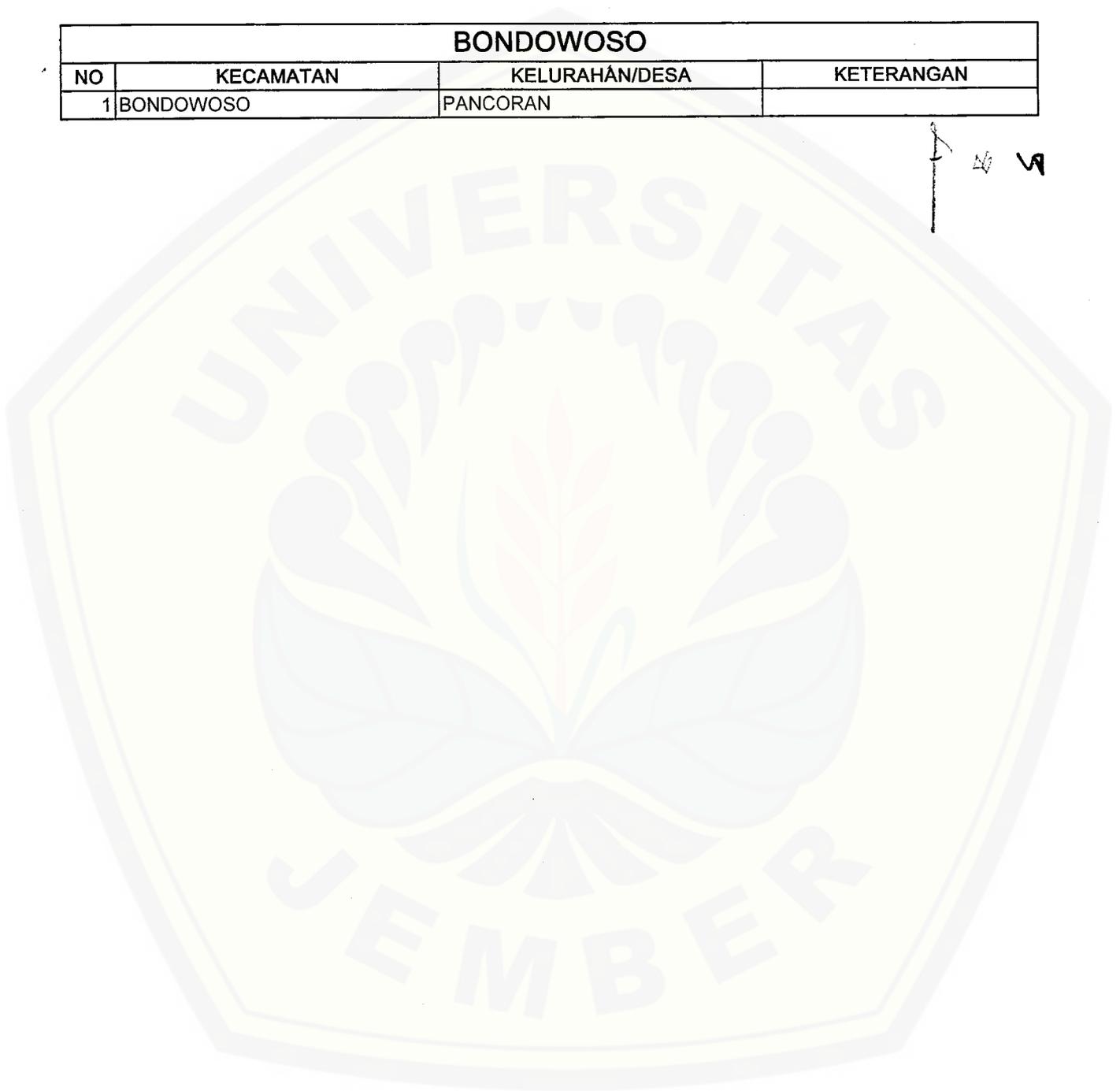
[Handwritten signature]



DAFTAR KELURAHAN/DESA SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP) APBN-P TA. 2013
PROVINSI JAWA TIMUR

BONDOWOSO			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	BONDOWOSO	PANCORAN	

1
W





DAFTAR KELURAHAN/DESA SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP) APBN-P TA. 2013
PROVINSI JAWA TIMUR

GRESIK			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	DRIYOREJO	BANJARAN	
2	DRIYOREJO	WEDOROANOM	
3	KEBOMAS	SUKOREJO	
4	MANYAR	LERAN	
5	MANYAR	MANYARSIDORUKUN	
6	MANYAR	NGAMPEL	
7	MENGANTI	BOBOH	

F 4 59



DAFTAR KELURAHAN/DESA SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP) APBN-P TA. 2013
PROVINSI JAWA TIMUR

JEMBER			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	AMBULU	KARANG ANYAR	

f 00 W





**DAFTAR KELURAHAN/DESA SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP) APBN-P TA. 2013
PROVINSI JAWA TIMUR**

JOMBANG			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	DIWEK	GROGOL	
2	JOGO ROTO	NGUMPUL	
3	JOGO ROTO	SAMBIREJO	
4	JOGO ROTO	SAWIJI	
5	KUDU	BENDUNGAN	
6	KUDU	KUDUBANJAR	
7	KUDU	MADE	
8	MOJOAGUNG	DUKUHDIMORO	
9	MOJOAGUNG	KEDUNGLUMPANG	
10	MOJOAGUNG	SEKETI	
11	MOJOAGUNG	TANGGALREJO	
12	MOJOWARNO	LATSARI	
13	MOJOWARNO	REJOSLAMET	
14	PETERONGAN	TENGARAN	

f s s



DAFTAR KELURAHAN/DESA SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP) APBN-P TA. 2013
PROVINSI JAWA TIMUR

KEDIRI			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	NGADILUWIH	BEDUG	
2	NGADILUWIH	MANGUNREJO	
3	NGADILUWIH	REMBANGKEPUH	
4	NGADILUWIH	SLUMBUNG	
5	PARE	BENDO	

f a w



DAFTAR KELURAHAN/DESA SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP) APBN-P TA. 2013
PROVINSI JAWA TIMUR

KOTA BATU			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	BATU	ORO-ORO OMBO	
2	BATU	PESANGGRAHAN	
3	BATU	SUMBEREJO	
4	BATU	TEMAS	
5	BUMIAJI	BULUKERTO	
6	BUMIAJI	BUMIAJI	
7	BUMIAJI	GIRIPURNO	
8	BUMIAJI	GUNUNGSARI	
9	BUMIAJI	PANDANREJO	
10	BUMIAJI	PUNTEN	
11	BUMIAJI	SUMBER BRANTAS	
12	BUMIAJI	SUMBERGONDO	
13	JUNREJO	BEJI	
14	JUNREJO	JUNREJO	
15	JUNREJO	TORONGREJO	

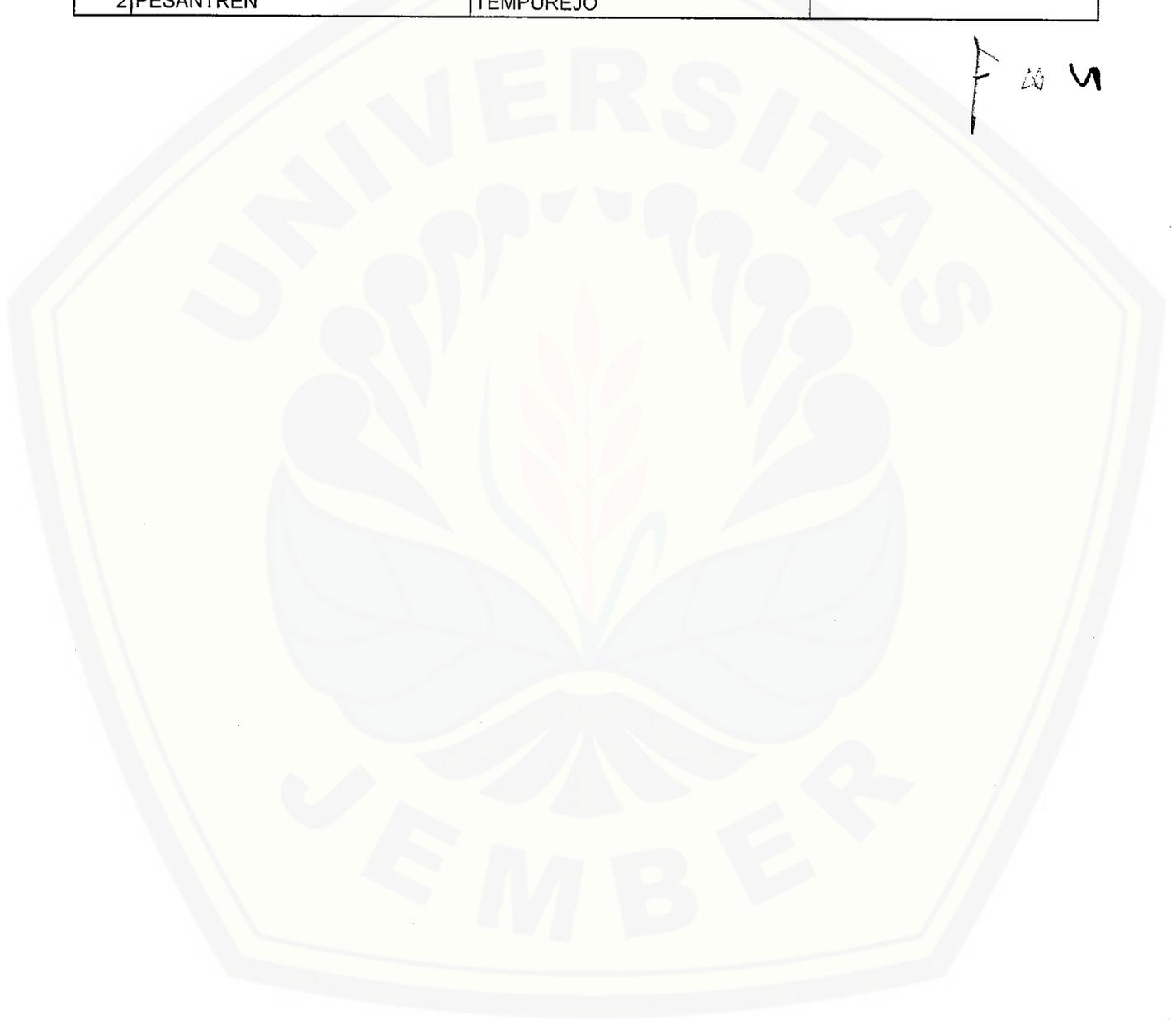
[Handwritten signature]



DAFTAR KELURAHAN/DESA SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP) APBN-P TA. 2013
PROVINSI JAWA TIMUR

KOTA KEDIRI			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	MOJOROTO	GAYAM	
2	PESANTREN	TEMPUREJO	

F 20 5





DAFTAR KELURAHAN/DESA SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP) APBN-P TA. 2013
PROVINSI JAWA TIMUR

KOTA MALANG			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	BLIMBING	PURWODADI	
2	KEDUNGKANDANG	WONOKOYO	
3	KEDUNGKANDANG	ARJOWINANGUN	
4	KLOJEN	GADINGKASRI	
5	KLOJEN	PENANGGUNGAN	
6	LOWOKWARU	TUNJUNGSEKAR	
7	SUKUN	BAKALAN KRAJAN	

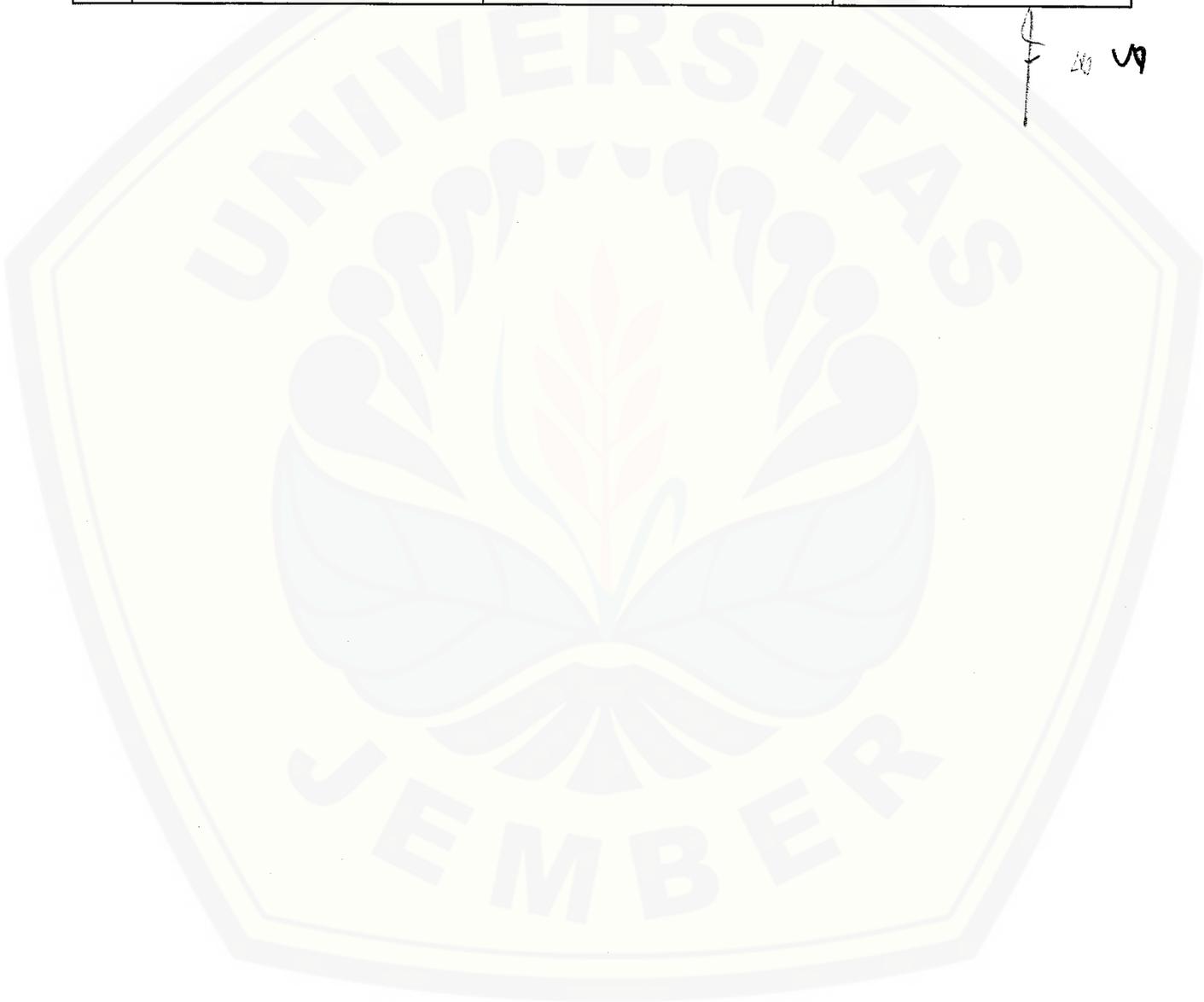
f 23 29



DAFTAR KELURAHAN/DESA SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP) APBN-P TA. 2013
PROVINSI JAWA TIMUR

KOTA PASURUAN			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	BUGULKIDUL	MANDARANREJO	
2	GADINGREJO	TRAJENG	
3	PURWOREJO	NGEMPLAKREJO	

f 20 19





DAFTAR KELURAHAN/DESA SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP) APBN-P TA. 2013
PROVINSI JAWA TIMUR

KOTA PROBOLINGGO			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	KADEMANGAN	POHSANGIT KIDUL	
2	KANIGARAN	KEBONSARI WETAN	
3	WONOASIH	KEDUNGASEM	
4	WONOASIH	KEDUNGGALENG	
5	WONOASIH	PAKISTAJI	

f 4 w



**DAFTAR KELURAHAN/DESA SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP) APBN-P TA. 2013
PROVINSI JAWA TIMUR**

KOTA SURABAYA			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	BENOWO	SEMEMI	
2	BUBUTAN	GUNDIH	
3	BUBUTAN	TEMBOK DUKUH	
4	BULAK	SUKOLILO	
5	GAYUNGAN	KETINTANG	
6	GENTENG	KAPASARI	
7	GUBENG	AIRLANGGA	
8	GUBENG	MOJO	
9	JAMBANGAN	KARAH	
10	JAMBANGAN	KEBONSARI	
11	JAMBANGAN	PAGESANGAN	
12	KENJERAN	BULAK BANTENG	
13	KENJERAN	SIDOTOPO WETAN	
14	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	
15	KREMBANGAN	KREMBANGAN SELATAN	
16	KREMBANGAN	MOROKREMBANGAN	
17	MULYOREJO	KEJAWEN PUTIH TAMBAK	
18	PABEAN CANTIAN	BONGKARAN	
19	PAKAL	BABAT JERAWAT	
20	PAKAL	BENOWO	
21	PAKAL	SUMBERREJO	
22	RUNGKUT	KEDUNG BARUK	
23	RUNGKUT	MEDOKAN AYU	
24	SAMBIKEREK	BRINGIN	
25	SAMBIKEREK	LONTAR	
26	SAMBIKEREK	MADE	
27	SAWAHAN	PAKIS	
28	SEMAMPIR	PEGIRIAN	
29	SIMOKERTO	SIMOKERTO	
30	SUKO MANUNGGAL	SIMOMULYO	
31	SUKO MANUNGGAL	SUKO MANUNGGAL	
32	SUKO MANUNGGAL	TANJUNGSARI	
33	SUKOLILO	GEBANG PUTIH	
34	TAMBAKSARI	DUKUH SETRO	
35	TAMBAKSARI	PLOSO	
36	TEGALSARI	TEGALSARI	
37	WONOCOLO	BENDUL MERISI	
38	WONOCOLO	MARGOREJO	
39	WONOCOLO	SIWALANKERTO	
40	WONOKROMO	NGAGELREJO	
41	WONOKROMO	WONOKROMO	



DAFTAR KELURAHAN/DESA SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP) APBN-P TA. 2013
PROVINSI JAWA TIMUR

KOTA LAMONGAN			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	LAMONGAN	KEBET	
2	LAMONGAN	KRAMAT	
3	LAMONGAN	RANCANG KENCONO	
4	LAMONGAN	SENDANGREJO	
5	PACIRAN	BANJARWATI	
6	PACIRAN	KEMANTREN	
7	PACIRAN	PALOH	
8	PACIRAN	SENDANGDUWUR	

f 00 w



DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAFTAR KELURAHAN/DESA SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP) APBN-P TA. 2013
PROVINSI JAWA TIMUR

LUMAJANG			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	LUMAJANG	BORENG	

f n a





DAFTAR KELURAHAN/DESA SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP) APBN-P TA. 2013
PROVINSI JAWA TIMUR

MAGETAN			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	KARANGREJO	BALUK	
2	KARANGREJO	GRABAHAN	
3	KARANGREJO	SAMBIREMBE	
4	MAOSPATI	KLAGEN GAMBIRAN	
5	MAOSPATI	RONOWIJAYAN	
6	MAOSPATI	TANJUNGSEPREH	

f 20 5

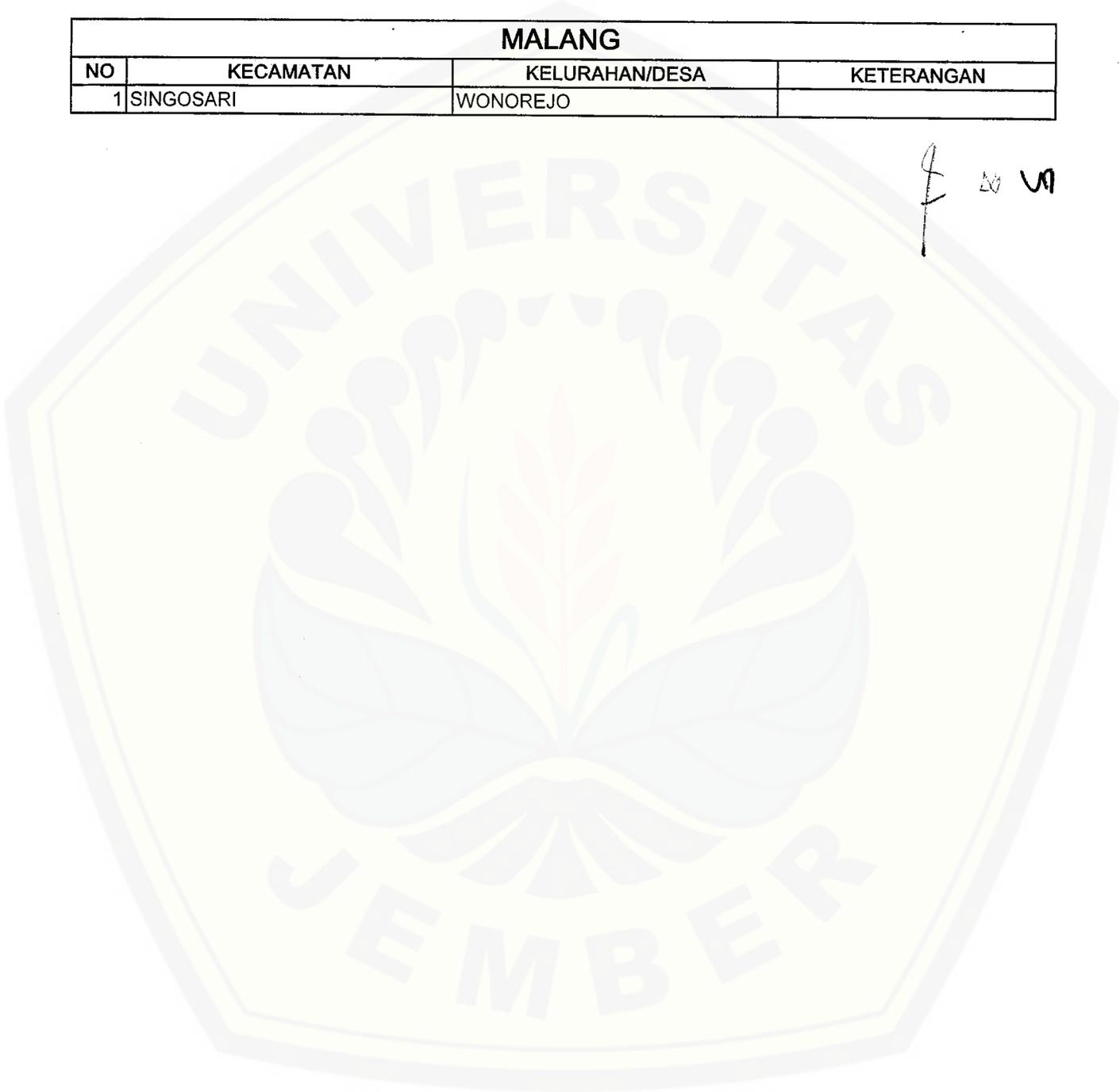


DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAFTAR KELURAHAN/DESA SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP) APBN-P TA. 2013
PROVINSI JAWA TIMUR

MALANG			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	SINGOSARI	WONOREJO	

f 20 W





DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAFTAR KELURAHAN/DESA SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP) APBN-P TA. 2013
PROVINSI JAWA TIMUR

MOJOKERTO			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	NGORO	CANDIHARJO	
2	NGORO	KEMBANGSRI	
3	NGORO	WATESNEGORO	
4	PURI	PURI	
5	SOOKO	KARANGKEDAWANG	
6	SOOKO	TEMPURAN	

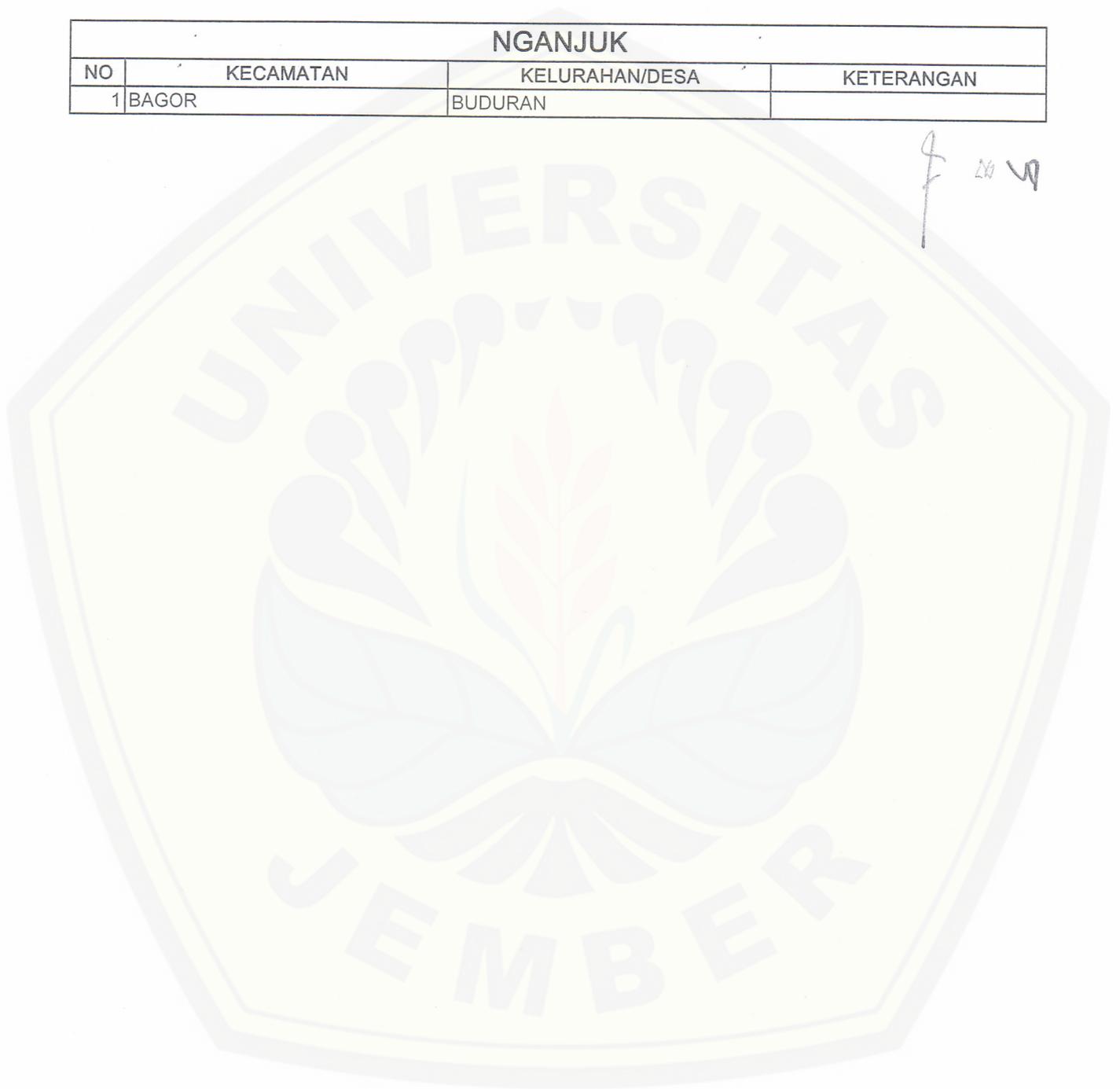
[Handwritten signature]
20 2



DAFTAR KELURAHAN/DESA SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP) APBN-P TA. 2013
PROVINSI JAWA TIMUR

NGANJUK			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	BAGOR	BUDURAN	

f 20 19





DAFTAR KELURAHAN/DESA SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP) APBN-P TA. 2013
PROVINSI JAWA TIMUR

PASURUAN			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
	GRATI	CUKUR GONDANG	
	GRATI	KARANG KLIWON	
	GRATI	KARANG LO	
	GRATI	PLOSOSARI	
	GRATI	REBALAS	

f 20 19



DAFTAR KELURAHAN/DESA SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP) APBN-P TA. 2013
PROVINSI JAWA TIMUR

PROBOLINGGO			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	BESUK	ALAS KANDANG	
2	BESUK	JAMBANGAN	
3	BESUK	KLAMPOKAN	
4	BESUK	MATEKAN	
5	KRAKSAAN	KALIBUNTU	

f 4 W



DAFTAR KELURAHAN/DESA SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP) APBN-P TA. 2013
PROVINSI JAWA TIMUR

SIDOARJO			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	BALONG BENDO	BAKALAN WRINGINPITU	
2	BALONG BENDO	BAKUNG TEMENGGUNGAN	
3	BALONG BENDO	BALONGBENDO	
4	BALONG BENDO	GAGANG KEPUHSARI	
5	BALONG BENDO	SINGKALAN	
6	BALONG BENDO	WARUBERON	
7	BUDURAN	PAGERWOJO	
8	CANDI	GELAM	
9	CANDI	SEPANDE	
10	CANDI	SIDODADI	
11	GEDANGAN	SEMAMBUNG	
12	KREMBUNG	CANGKRING	
13	KREMBUNG	TAMBAKREJO	
14	PORONG	KEDUNGSOLO	
15	PRAMBON	WIROBITING	
16	SEDATI	BETRO	
17	SEDATI	KWANGSAN	
18	SIDOARJO	CEMENG BAKALAN	
19	SIDOARJO	GEBANG	
20	SIDOARJO	LEMAHPUTRO	
21	TAMAN	SIDODADI	
22	TAMAN	TAWANGSARI	
23	TAMAN	TROSOBO	
24	WARU	NGINGAS	

f a w



DAFTAR KELURAHAN/DESA SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP) APBN-P TA. 2013
PROVINSI JAWA TIMUR

SITUBONDO			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	ASEMBAGUS	BANTAL	
2	MANGARAN	SEMIRING	
3	MANGARAN	TANJUNG KAMAL	
4	SITUBONDO	KALIBAGOR	

f 4 W



DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAFTAR KELURAHAN/DESA SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP) APBN-P TA. 2013
PROVINSI JAWA TIMUR

TUBAN			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	TUBAN	KEMBANGBILO	

f 06 W



DAFTAR KELURAHAN/DESA SASARAN
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP) APBN-P TA. 2013
PROVINSI JAWA TIMUR

TULUNGAGUNG			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	NGUNUT	KACANGAN	
2	NGUNUT	PULOSARI	
3	NGUNUT	PULOTONDO	
4	NGUNUT	SAMIR	
5	NGUNUT	SELOREJO	

f 20 W

Lampiran 6

Pedoman wawancara

1. Mengapa bantuan P4IP disalurkan untuk pembangunan jalan paving?
2. Dimana saja lokasi yang mendapat bantuan pembangunan jalan paving (P4IP)? Mengapa lokasi itu dipilih sebagai lokasi pembangunan jalan paving (P4IP)?
3. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan paving yang telah dibangun melalui P4IP?
4. Bagaimana teknis pelaksanaan pembangunan jalan paving yang dilaksanakan di desa anda?
5. Apakah selama pengerjaan pembangunan jalan paving menemukan kendala?
6. Bagaimana pendapat anda (masyarakat) tentang jalan paving yang telah dibangun di daerah anda?
7. Bagaimanakah upaya yang telah anda (masyarakat) upayakan dalam pemeliharaan jalan paving yang telah dibangun melalui P4IP?



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4



Gambar 5



Gambar 6



Gambar 7



Gambar 8



Gambar 9

Keterangan:

Gambar 1 : wawancara dengan warga RT 001/ RW 018 (Bapak Miftahul Ulum)

Gambar 2 : wawancara dengan warga RT 05/ RW 20 (Ibu Susiyati)

Gambar 3 : wawancara dengan warga RT 01/ RW 015 (Bapak Abdurrahman)

Gambar 4 : wawancara dengan warga RT 02/ RW 11 (Bapak Suroto)

Gambar 5 : wawancara dengan warga RT 04/ RW 04 (Bapak Satimo)

Gambar 6 : wawancara dengan ketua KSM (Bapak Sujarno dan Bapak Siswanto)

Gambar 7 : Struktur organisasi LKM Desa Karanganyar

Gambar 8 : Ketua LKM Desa Karanganyar (Bapak Baitul Aziz)

Gambar 9 : Kantor Desa Karanganyar tampak dari depan.